



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA
PERUSAHAAN KONTRAKTOR PERTAMBANGAN
(STUDI KASUS PT RBA)**

SKRIPSI

**INES NATASYA
0906608071**

**FAKULTAS EKONOMI PROGRAM
EKSTENSI AKUNTANSI
UNIVERSITAS INDONESIA**

**DEPOK
2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA
PERUSAHAAN KONTRAKTOR PERTAMBANGAN
(STUDI KASUS PT RBA)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

**INES NATASYA
0906608071**

**FAKULTAS EKONOMI PROGRAM
EKSTENSI AKUNTANSI
UNIVERSITAS INDONESIA**

**DEPOK
2012**

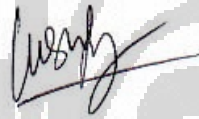
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ines Natasya

NPM : 0906608071

Tanda Tangan :



Tanggal : 4 Juli 2012

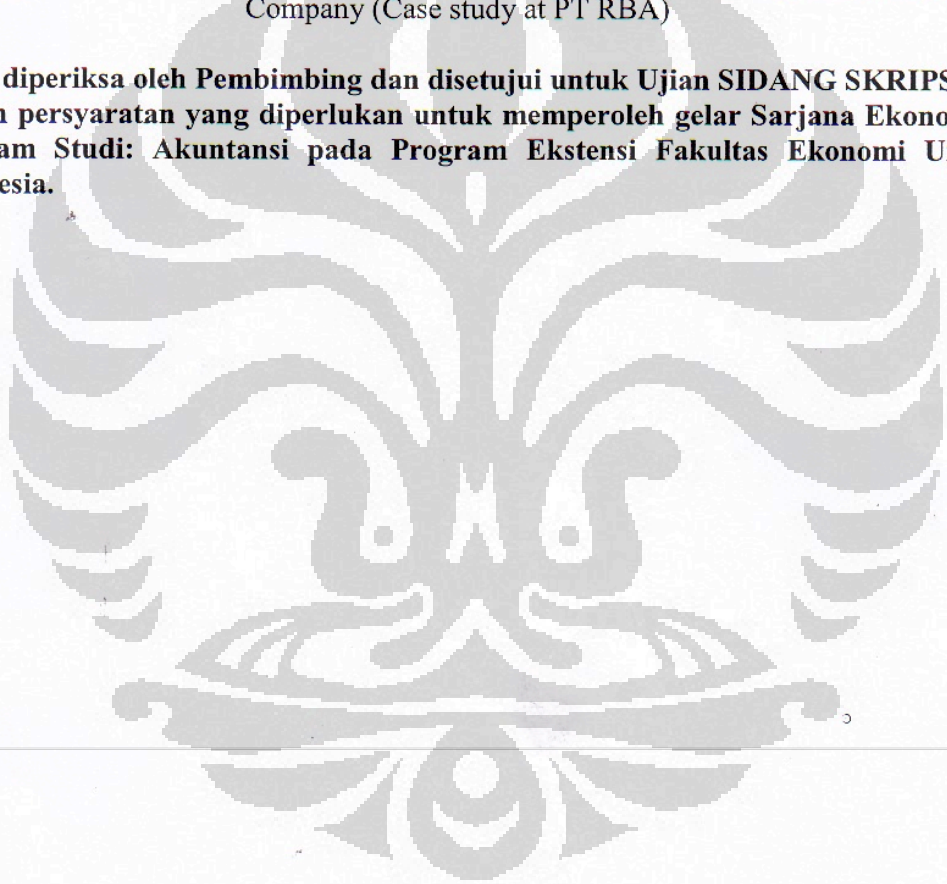
HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Ines Natasya
NPM : 0906608071
Program Studi : Akuntansi
Kekhususan : -
Judul Skripsi

- Indonesia : Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Kontraktor Pertambangan (Studi Kasus PT RBA)
- Inggris : Analysis of Corporate Income Tax Planning on Mining Contractor Company (Case study at PT RBA)

Telah diperiksa oleh Pembimbing dan disetujui untuk Ujian SIDANG SKRIPSI sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi untuk Program Studi: Akuntansi pada Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.



Depok, 4 Juli 2012
Menyetujui,
Pembimbing Skripsi

(Dahlia Sari S.E., M.Si)

LEMBAR PENGESAHAN

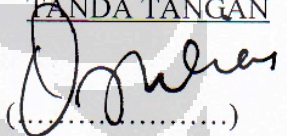
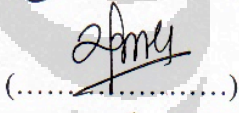
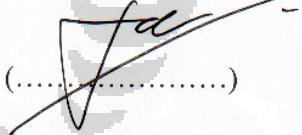
Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Ines Natasya
NPM : 0906608071
Program Studi : Akuntansi
Kekhususan : -
Judul Skripsi

- Indonesia : Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Kontraktor Pertambangan (Studi Kasus PT RBA)
- Inggris : Analysis of Corporate Income Tax Planning on Mining Contractor Company (Case study at PT RBA)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, pada Program Ekstensi Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

	<u>NAMA</u>	<u>TANDA TANGAN</u>
Pembimbing :	Dahlia Sari S.E., M.Si.	 (.....)
Penguji I :	Nurul Husnah S.E., M.S.Ak.	 (.....)
Penguji II :	Catur Sasongko S.E., M.B.A.	 (.....)
Ditetapkan di :	Depok	
Tanggal :	4 Juli 2012	

**Ketua Program Studi Ekstensi
Akuntansi,**

Sri Nurhayati, MM., S.A.S
NIP. 19600317 198602 2 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi berjudul “Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Kontraktor Pertambangan (Studi Kasus PT RBA)” telah dapat saya selesaikan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dan mendukung penyusunan skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Ibu Dahlia Sari, S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing, atas bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ibu dan keluarga atas nasihat, dukungan, dan doa dalam penyusunan skripsi ini.
3. Candra Kristiono Wibowo yang telah memberikan dukungan, pengertian, saran serta motivasi dalam menyelesaikan studi ini.
4. Rekan-rekan kerja di PT RBA yang telah menyediakan waktu dan data yang diperlukan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Teman-teman dan rekan kerja dikantor yang telah memberikan waktu dan semangat untuk menyelesaikan studi ini.

Saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, namun saya berharap skripsi ini tidak hanya memberikan manfaat pembaca pada khususnya, serta dunia pendidikan pada umumnya, tetapi juga mendatangkan saran, kritik dan masukan agar karya tulis saya berikutnya menjadi lebih baik.

Depok, 4 Juli 2012



Ines Natasya

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS
(Hasil Karya Perorangan)**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ines Natasya
NPM : 0906608071
Program Studi : Ekstensi
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty- Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PERUSAHAAN
KONTRAKTOR PERTAMBANGAN (STUDI KASUS PT RBA)**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada Tanggal: 4 Juli 2012

Yang menyatakan,



(Ines Natasya)

ABSTRAK

Nama : Ines Natasya
Program Studi : Akuntansi
Judul : Analisa Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Kontraktor Pertambangan (Studi Kasus PT RBA)

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai penerapan perencanaan pajak pada PT RBA dan mengetahui alternatif-alternatif yang ada dari perencanaan pajak dalam berbagai transaksi bisnis perusahaan. Dan selanjutnya dapat diterapkan alternatif yang terbaik yang memberikan penghematan pajak dan laba bersih setelah pajak yang paling maksimal. Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada PT RBA, teknik pengumpulan data yaitu dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan wawancara dengan pihak perusahaan maupun melalui observasi secara langsung.

Kata Kunci : Kewajiban Perpajakan, Perencanaan Pajak, Beban per *Fiskal*.

ABSTRACT

Name : Ines Natasya
Study Program : Accounting
Title : Analysis of Corporate Income Tax Planning on Mining Contractor Company (Case study at PT RBA)

The objectives of this study is to provide an overview of the implementation of tax planning on a PT RBA and knowing that there are alternatives of tax planning in a variety of business transactions. Then can be applied to the best alternative that provides tax saving and net profit after tax at the maximum. Scope in this study is limited within PT RBA data collection technique with library research and field research by interviewing with the manajemen as well as direct observations.

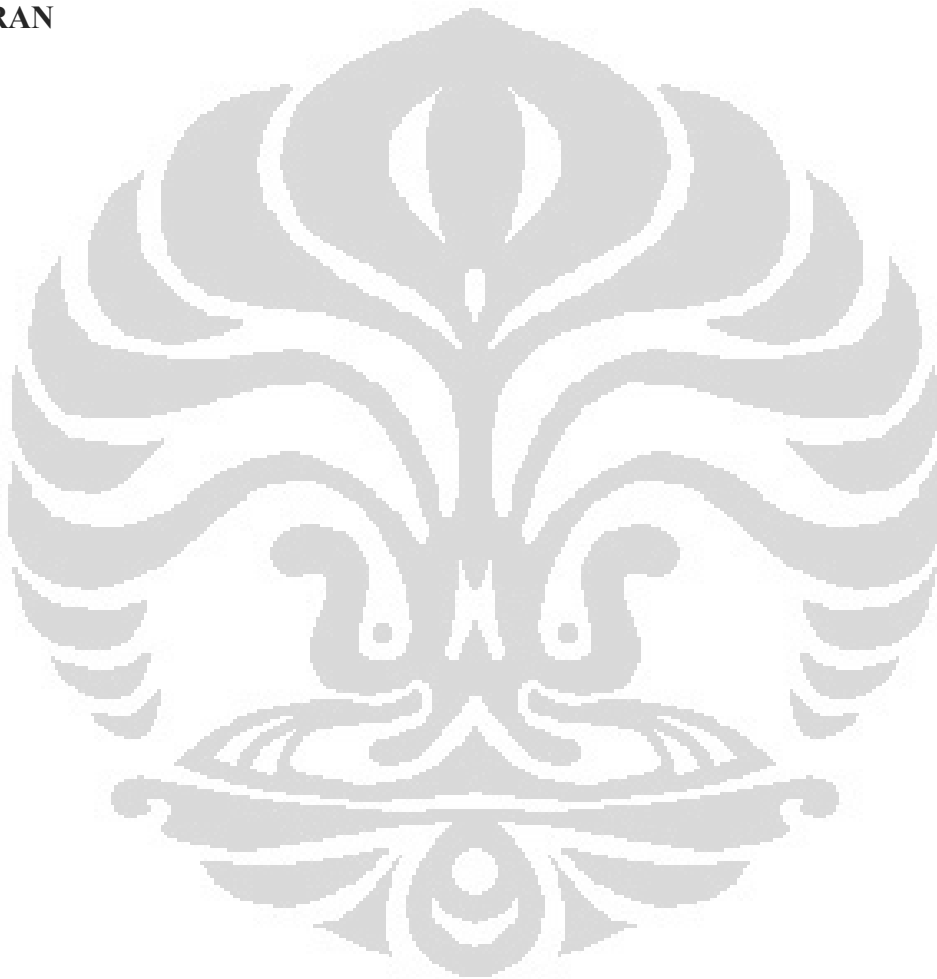
Keyword : Tax Obligation, Tax Planning, Cost by Fiscal.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	i
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	i
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Perumusan Masalah.....	4
3. Tujuan Penelitian.....	4
4. Manfaat/Kontribusi Utama Dalam Penelitian	5
5. Ruang Lingkup Penelitian	5
6. Sistematika Penulisan.....	5
 BAB 2 LANDASAN TEORI	
1. Definisi Pajak	7
1.1 Ciri-Ciri Pajak	8
1.2 Manajemen Pajak	8
1.3 Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>).....	9
1.4 Tujuan Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	10
1.5 Jenis-Jenis Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	11
1.6 Motivasi Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	11
1.7 Manfaat Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	13
1.8 Strategi Dasar Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	14
1.9 Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>).....	15
 BAB 3 PROFIL PERUSAHAAN	
1. Profil Perusahaan.....	17
2. Visi dan Misi Perusahaan	18
 BAB 4 ANALISIS PERENCANAAN PAJAK	
1. Pengadaan Aset Tetap	20
1.1 Pembelian Tunai	20
1.2 Kredit Investasi.....	21
1.3 Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>)	24
1.4 Analisis Alternatif Pengadaan Aset Tetap yang Sebaiknya Dipilih.....	28
2. Penyusutan Aset Tetap	30
2.1 Analisis Perencanaan Pajak pada Penyusutan Aset Tetap	32
3. Beban Kesehatan Karyawan.....	33

3.1 Analisis Perencanaan Pajak pada Beban Kesehatan Karyawan	33
4. Pajak atas Penghasilan Karyawan	34
4.1 Analisis Perencanaan Pajak pada Pajak atas Penghasilan Karyawan	34
5. Beban Tunjangan Makan (<i>Catering</i>).....	41
5.1 Analisis Perencanaan Pajak pada Beban Tunjangan Makan (<i>Catering</i>).....	41
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	
1. Kesimpulan.....	43
2. Saran.....	44
DAFTAR REFERENSI.....	45
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

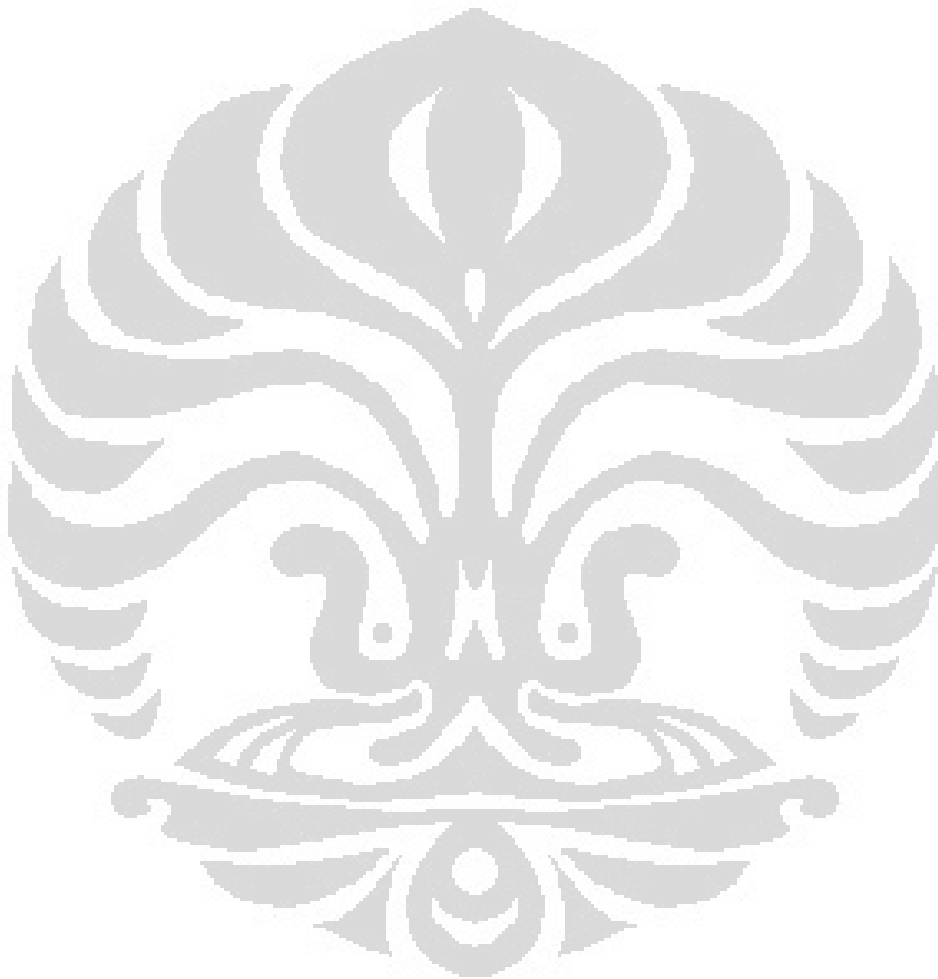
- Tabel 4.1. Nilai Beban Penyusutan dengan Metode Saldo Menurun
- Tabel 4.2. Skedul Pembayaran Kredit Investasi dan nilai *Present Valuenya*
- Tabel 4.3. *Tax saving* dalam alternatif kredit investasi
- Tabel 4.4. Skedul Pembayaran Sewa Guna Usaha dan nilai *Present Valuenya*
- Tabel 4.5. Nilai Penyusutan Setelah Masa Sewa Guna Usaha Berakhir
- Tabel 4.6. *Tax saving* dalam alternatif Sewa Guna Usaha
- Tabel 4.7. Perbandingan Pembelian Tunai, Kredit Bank, dan Sewa Guna Usaha
- Tabel 4.8. Tarif Penyusutan untuk Aset Tetap Bukan Bangunan
- Tabel 4.9. Tarif Penyusutan untuk Aset Tetap Berupa Bangunan
- Tabel 4.10. Nilai Beban Penyusutan Avanza
- Tabel 4.11. Beban Penyusutan dan Nilai *Present Valuenya*
- Tabel 4.12. Perbandingan Penghematan Pajak atas Nilai Beban Penyusutan
- Tabel 4.13. Rincian PPh 21 Karyawan Ditanggung Perusahaan
- Tabel 4.14. Rincian PPh 21 Karyawan Ditunjang Dengan Metode *Gross Up*
- Tabel 4.15. Rincian PPh 21 Karyawan Sebagian Ditunjang dan Sebagian lagi Ditanggung Perusahaan
- Tabel 4.16. Perbandingan Nilai Penghematan dari Alternatif yang ada

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Nilai Rincian PPh 21 Karyawan Ditanggung Perusahaan Lampiran II

Rincian PPh 21 Karyawan Ditunjang Dengan Metode *Gross Up*

Lampiran III Rincian PPh 21 Karyawan Sebagian Ditunjang dan Sebagian lagi Ditanggung Perusahaan



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah sangat mengandalkan penerimaan dalam negeri untuk membebani pengeluarannya, baik untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Penerimaan yang dimaksud ini merupakan penerimaan pajak. Salah satu kontribusi pajak yang diandalkan oleh pemerintah merupakan pajak yang disetorkan oleh perusahaan, yaitu pajak penghasilan badan. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut selanjutnya akan digunakan untuk membebani pembangunan berbagai fasilitas publik, seperti sekolah, jalan raya, jembatan penyeberangan, rumah sakit, dsb. Berbagai fasilitas publik tersebut diperuntukkan bagi masyarakat agar bisa mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Maka dari itu, realisasi penerimaan pajak oleh negara sangat diharapkan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian harta kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah pajak bersifat dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik secara langsung. Penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara sejak tahun 1980-an. Dilihat dari sisi pemerintah, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang harus dioptimalkan untuk membebani pengeluaran negara. Sedangkan dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan beban atau beban yang mempengaruhi laba dan asumsi pajak sebagai distribusi laba kepada pemegang saham akan mempengaruhi *rate of return on investment*, oleh karena itu setiap perusahaan pasti akan meminimalkan pembayaran pajaknya guna mengoptimalkan laba. Hampir semua orang baik secara pribadi ataupun kelompok (badan) berusaha untuk mengatur jumlah pajak yang dibayar. Kemungkinan yang membuat wajib pajak melakukan usaha-usaha untuk menghindarkan diri dari pajak adalah bahwa dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu secara langsung dari pemerintah. Pengeluaran uang untuk pembayaran pajak akan disenangi apabila ketika wajib pajak

mengeluarkan uang untuk membayar pajak, pemerintah harus memberikan kontra prestasi yang seimbang dengan uang yang dibayarkan.

Dalam praktek bisnis, umumnya pengusaha mengidentikan pembayaran pajak sebagai beban, sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manajer wajib menekan beban seoptimal mungkin. Pihak fiskus pajakpun mengetahui dan menyadari ada suatu kecenderungan dari wajib pajak pribadi, terutama badan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Tindakan meminimalkan pembayaran pajak tersebut bukan merupakan tindakan pelanggaran atau pidana selama tidak menyimpang dari ketentuan Undang-Undang perpajakan. Tindakan meminimalkan pembayaran pajak ini biasa dikenal dengan istilah perencanaan pajak atau manajemen pajak. Dengan menerapkan manajemen pajak, wajib pajak dalam hal ini adalah perusahaan, dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga perusahaan dapat memperoleh tingkat keuntungan yang optimal dan sekaligus meningkatkan likuiditas. Lumbantoruan (1999) mengemukakan perlunya manajemen pajak sebagai pengelolaan hak dan kewajiban pajak secara benar sehingga jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dengan demikian, dikemudian hari tidak terjadi restitusi pajak atau kurang bayar yang mengakibatkan denda dan kewajiban-kewajiban hukum lainnya. Sebuah manajemen pajak merupakan bagian dari manajemen keuangan perusahaan, yaitu aktifitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aset dengan beberapa tujuan secara menyeluruh (Erly Suandy, 2006). Manajemen pajak dilakukan dari tahap perencanaan sampai pengendalian dengan cara yang benar supaya dalam implementasinya tidak menimbulkan persoalan seperti kesalahan dalam mengisi SPT, terjadi kurang bayar, telat bayar, dokumen yang kurang lengkap atau terjadi lebih bayar. Manajemen pajak digunakan dalam rangka penghematan pajak (*tax saving*) atau upaya mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Tidak jarang dalam rangka penghematan pajak, perusahaan juga melakukan cara yang tidak dibenarkan seperti penggelapan pajak (*tax evasion*) dan atau penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak, apakah berhasil atau tidak, untuk mengurangi atau sama sekali menghapus hutang pajak perusahaan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap peraturan

perundang-undangan perpajakan (Zain, 2008). Sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak bukan merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang pajak (Zain, 2008). Strategi yang dilakukan dalam *tax planning* lebih pada memanfaatkan celah-celah atau lubang-lubang yang terdapat dalam undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, *tax planning* pada dasarnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Suatu sistem manajemen pajak yang efektif merupakan hal yang vital bagi suatu usaha yang berorientasi kepada keuntungan dan predikat sebuah tim manajemen yang sukses kadang-kadang ditentukan pula oleh sukses tidaknya penyusunan suatu *tax planning* (Zain, 2008). Tujuan dari *tax planning* secara khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal berikut:

1. Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali.
2. Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan.
3. Menunda pengakuan penghasilan.
4. Mengubah penghasilan rutin berbentuk *capital gain*.
5. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru.
6. Menghindari pengenaan pajak berganda.
7. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak.

Perencanaan pajak yang baik harus memperhatikan tiga hal, yaitu:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak dilakukan dengan melanggar ketentuan perpajakan, maka wajib pajak menanggung risiko yang akan mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
2. Secara bisnis masuk akal karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sehingga perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.

3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, seperti surat perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*), dan juga perlakuan akuntansinya.

Penerapan manajemen pajak dalam suatu perusahaan pada dasarnya memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, sebagai usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kedua, mematuhi segala ketentuan administratif sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Ketiga, melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan. Perencanaan pajak itu sendiri merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, dengan penekanan pada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Oleh karena itu setiap perusahaan sudah seharusnya menerapkan manajemen pajak dengan benar agar tidak merugikan perusahaan dan perusahaan dapat mengoptimalkan keuntungannya. Mengetahui pentingnya penerapan perencanaan pajak pada perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya dalam mengoptimalkan laba bersihnya dengan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada negara, penulis ingin mencoba menetapkan judul **“Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Kontraktor Pertambangan (Studi Kasus PT RBA)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Adapun masalah yang ingin diungkap didalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh PT RBA atas perhitungan pajak penghasilan badan?
2. Apa saja strategi yang dilakukan “PT. RBA” dalam melakukan perencanaan pajak supaya beban pajak yang dibayar perusahaan menjadi minimal sehingga laba yang diperoleh menjadi optimal?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan perpajakan pada PT RBA atas pajak penghasilan badan.
2. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan “PT. RBA” dalam melakukan perencanaan pajak supaya beban pajak yang dibayar perusahaan menjadi minimal sehingga laba yang diperoleh menjadi optimal.

1.4. Manfaat / Kontribusi utama dalam penelitian

Penulis mengharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

1. Perusahaan

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mengambil keputusan atau masukan dalam melakukan perencanaan pajak demi tercapainya laba yang optimal.

2. Penulis

Membantu penulis dalam memahami dan menambah pengetahuan mengenai perpajakan, khususnya tentang manajemen pajak penghasilan badan.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada satu perusahaan yaitu PT. RBA yang merupakan perusahaan kontraktor pertambangan. Aspek perencanaan pajak yang dibahas antara lain alternatif pengadaan aset tetap, penyusutan aset tetap, beban kesehatan karyawan, pajak atas penghasilan karyawan, beban tunjangan makan. Analisis dilakukan dengan membuat simulasi perhitungan untuk melihat berhasil atau tidaknya suatu alternatif perencanaan pajak yang dipakai perusahaan dan menentukan strategi perencanaan perpajakan yang terbaik bagi PT. RBA.

1.6. Sistematika Penulisan

Pembahasan atas penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang bertujuan untuk mempermudah dalam pemahaman penelitian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I menguraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan atau kontribusi utama penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab II menjelaskan tentang teori yang terkait dengan penelitian, literatur yang digunakan dalam penelitian, serta penelitian terdahulu yang bisa digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian oleh penulis.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab III menyajikan profil perusahaan dan kebijakan perusahaan dalam pencatatan akuntansi maupun kewajiban perpajakannya yang digunakan sebagai penelitian oleh penulis.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab IV menguraikan tentang data-data yang diperoleh dari PT. RBA dan dipakai dalam penelitian oleh penulis. Analisa perencanaan pajak yang dapat diterapkan supaya memberikan penghematan pajak dan laba bersih setelah pajak yang paling optimal.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V berisi kesimpulan atas hasil analisis yang dapat ditarik dan saran yang dapat diambil untuk perencanaan pajak perusahaan.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1. Definisi Pajak

Pengertian pajak secara umum merupakan iuran rakyat kepada Negara yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditujukan.

Pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani (Zain, 2008) adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membebani pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (Waluyo, 2009), pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membebani pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membebani *public investment*.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang dimaksud dengan pajak adalah "*kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*".

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan ada lima unsur pajak dalam definisi pokok pajak, yaitu:

1. Iuran/pungutan dari rakyat kepada Negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang.
3. Pajak dapat dipaksakan.
4. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi.
5. Digunakan untuk membebani rumah tangga Negara (pengeluaran umum pemerintah)

2.1.1. Ciri-Ciri Pajak

Ciri – ciri pajak menurut Mardiasmo (2006) adalah:

1. Iuran rakyat kepada Negara.
2. Berdasarkan Undang-Undang.
3. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan.
4. Digunakan untuk membebani rumah tangga negara, yakni pengeluaran–pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Sedangkan ciri-ciri pajak menurut Zain (2008) adalah :

1. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrasi pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembebanan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individu oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
5. Selain fungsi *budgetair* (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembebanan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/*regulatif*).

2.1.2. Manajemen Pajak

Manajemen merupakan sebuah bentuk pekerjaan yang mencakup pengkoordinasian sumber daya yang ada ke arah pencapaian sasaran organisasi. Menurut Hersey dan Blanchard (1988) yang dikutip oleh Nawawi (2006), manajemen terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, dan pengendalian. Manajemen menurut Stoner (1996) merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah

ditetapkan. Upaya legal yang dapat dilakukan perusahaan untuk penghematan pajak adalah dengan implementasi manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Lumbantoruan, 1999).

Tujuan manajemen pajak menurut Suandy (2011) yaitu:

- a. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar;
- b. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Fungsi manajemen pajak menurut Zain (2004) yaitu:

- a. Perencanaan pajak (*tax planning*), merupakan upaya legal yang bisa dilakukan Wajib Pajak karena hanya dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur;
- b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku;
- c. Pengendalian pajak (*tax control*), memastikan bahwa peraturan perpajakan telah dilaksanakan.

2.1.3. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Pada umumnya perencanaan pajak merupakan upaya penghematan dengan cara menekan jumlah kewajiban pajak tanpa bertentangan dengan Undang-Undang pajak yang berlaku. *Tax planning* merupakan tahap awal dalam manajemen pajak dimana dalam tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2011). Perencanaan pajak merupakan proses pengorganisasian usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Zain, 2008).

Sedangkan menurut Lumbantoruan (1999), perencanaan pajak adalah upaya legal yang bisa dilakukan Wajib Pajak, disebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur. Menurutnya, perencanaan pajak adalah suatu rencana kebijaksanaan keuangan perusahaan dengan memperhatikan kewajiban pembayaran pajak, peraturan pembayaran pajak, kapasitas

badan usaha, dan faktor eksternal. Secara teoritis, perencanaan pajak merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen pajak, yang terdiri dari perencanaan, implementasi, dan kontrol. Perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan (*tax planning*) termasuk ke dalam salah satu fungsi spesifik manajemen, yaitu fungsi perencanaan, dimana dalam proses menetapkan perencanaan penyusunan strategi penghematan pajak.

Penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Hal ini dapat dilihat dari dua definisi perencanaan pajak berikut ini, menurut Larry, Friedman, dan Susan (1994 dalam Suandy 2011) perencanaan pajak adalah analisis sistematis pilihan pajak yang berbeda yang ditujukan untuk meminimalkan kewajiban pajak dalam periode pajak masa kini dan masa depan. Sementara itu menurut Susan (1996) yang dikutip dari Suandy (2011), perencanaan pajak adalah pengaturan bisnis seseorang dan atau keperluan pribadi untuk meminimalkan beban pajak.

Secara garis besar, perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal dalam rangka memaksimalkan nilai perusahaan secara keseluruhan dengan memanfaatkan fasilitas dan keuntungan yang disediakan Undang-Undang.

2.1.4. Tujuan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Pada umumnya tujuan perencanaan pajak bagi perusahaan adalah untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dan menunda selambat mungkin kewajiban pajak untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dengan adanya perencanaan pajak, perusahaan dapat menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan perusahaan dapat mengefisiensikan pajak yang diharapkan.

Sedangkan tujuan dari perencanaan pajak secara lebih khusus menurut Mangoting (1999) adalah untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali.
2. Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan.
3. Menunda pengakuan penghasilan.
4. Mengubah penghasilan rutin berbentuk *capital gain*.
5. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru.

6. Menghindari pengenaan pajak ganda.
7. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak.

Tujuan pokok dari perencanaan pajak adalah untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Namun tidak berarti bahwa setiap tindakan akan menghasilkan kemungkinan jumlah pajak terendah dalam kondisi tertentu.

2.1.5. Jenis-Jenis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Sebelum melakukan perencanaan pajak, seorang perencana pajak harus mengetahui jenis-jenis perencanaan pajak terlebih dahulu. Jenis-jenis perencanaan pajak menurut Suandy (2006) adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Pajak Nasional (*National Tax Planning*)

Perencanaan pajak nasional hanya memperhatikan Undang-Undang domestik, pemilihan atas dilaksanakan atau tidak suatu transaksi dalam perencanaan pajak nasional bergantung pada transaksi tersebut. Artinya untuk menghindari atau mengurangi pajak, wajib pajak dapat memilih jenis transaksi apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang ada.

2. Perencanaan Pajak Internasional (*Internasional Tax Planning*)

Perencanaan pajak internasional selain harus memperhatikan Undang-Undang domestik, juga harus memperhatikan Undang-Undang atau perjanjian pajak (*tax treaty*) dari negara-negara yang terlibat.

Dari kedua jenis perencanaan pajak tersebut, maka dapat diketahui perbedaan utama antara perencanaan pajak nasional dengan perencanaan pajak internasional. Perbedaan tersebut terletak pada peraturan pajak yang akan digunakan. Dalam perencanaan pajak nasional hanya memperhatikan Undang-undang domestik, tetapi perencanaan pajak internasional disamping Undang-Undang domestik juga harus diperhatikan Undang-Undang dari negara-negara terlibat.

2.1.6. Motivasi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Motivasi dilakukannya perencanaan pajak bersumber dari tiga unsur perencanaan pajak, yaitu Kebijakan Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan dan Administrasi Perpajakan (Suandy, 2008).

1. Kebijakan perpajakan

Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak berdasarkan kebijakan perpajakan yaitu:

① Jenis pajak yang dipungut

Berbagai jenis pajak yang harus menjadi pertimbangan utama dalam sistem perpajakan modern yang mempunyai sifat perlakuan pajak sendiri-sendiri yaitu: Pajak Penghasilan Badan dan Perseorangan; pajak *capital gains*; *withholding tax* atas gaji, dividen, sewa, bunga, dan royalty; pajak atas *import*, *ekspor* dan bea masuk; pajak atas undian atau hadiah; *capital transfer*; *business license*; dan bea materai.

② Subjek pajak

Adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran dividen dari Badan Usaha kepada pemegang saham perorangan dan kepada pemegang saham badan usaha dapat menimbulkan usaha untuk perencanaan pajak agar beban pajak rendah dan meringankan *cash flow* perusahaan sehingga bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang lain. Di samping itu, ada pertimbangan untuk menunda pembayaran dividen dengan cara meningkatkan jumlah laba yang ditahan (*retained earnings*) bagi perusahaan yang juga akan menimbulkan penundaan pembayaran pajak.

③ Apa saja yang merupakan objek pajak dan besarnya tarif pajak

Perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah. Karena objek pajak merupakan basis perhitungan (*tax bases*) besarnya pajak, maka untuk optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pajak yang tidak lebih (karena bisa mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (agar tidak harus membayar sanksi yang berarti pemborosan dana). Dan dengan adanya penerapan tarif progresif dan tarif yang bergantung pada setiap bagian penghasilan yang diterapkan, mengakibatkan perencana pajak berusaha untuk mendapatkan tarif yang paling rendah (*low bracket*).

0 Prosedur pemungutan pajak

Sistem *self assessment* dan *payment* mengharuskan perencana pajak melakukan perencanaan pajak dengan baik. Dengan ditingkatkannya penerapan pemungutan pajak di Indonesia, mengakibatkan *cash flow* perusahaan terganggu dan bisa mengakibatkan kelebihan pembayaran yang restitusinya bisa memakan waktu dan beban yang tidak sedikit.

2. Undang-Undang perpajakan

Dalam praktiknya, tidak ada Undang-Undang yang mengatur semua permasalahan pajak dan secara teknis. Biasanya selalu diikuti dengan ketentuan pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak. Namun terkadang dapat kita temukan ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang karena adanya penyesuaian dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan yang menyebabkan munculnya celah (*loopholes*) bagi wajib pajak seperti perbedaan tarif pajak, perbedaan perlakuan objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak dan kesempatan atas penghematan pajak.

3. Administrasi perpajakan

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya. Hal ini mendorong perusahaan melaksanakan perencanaan pajak agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif dengan melakukan pengisian SPT dan pembayaran pajak tepat waktu, dan disertai pengawasan implementasi *tax planning*.

2.1.7. Manfaat Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Manfaat yang dapat diambil bagi perusahaan apabila perencanaan pajak dilakukan secara baik dan benar menurut Mangonting (1999) adalah:

1. Menghemat kas keluar, perencanaan pajak perusahaan dapat meminimalisir pajak yang dianggap sebagai unsur beban dalam proses operasional perusahaan sehingga perusahaan dapat melakukan ekspansi usaha.
2. Mengatur aliran kas, dengan perencanaan pajak yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi

kebutuhan kas terhadap pajak dan menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi.

Manfaat perencanaan pajak dalam beberapa kasus tidak dapat dihitung secara pasti sebab bentuknya *intangible*, seperti penghematan beban kepatuhan berupa *time cost*, *physic cost*, atau *opportunity cost* (Gatot & Faisal, 2009).

2.1.8. Strategi Dasar Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Beberapa strategi pajak yang biasa diambil dalam melakukan perencanaan pajak menurut Lumbantoruan (1999), yaitu:

1. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan.
2. Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk-bentuk perusahaan yang tepat. Dilihat dari segi perpajakan bentuk usaha perseorangan, firma, dan kongsi lebih menguntungkan daripada perseroan terbatas.
3. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga dapat diatur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak, potensi penghasilan, kerugian, dan aset yang bisa dihapus.
4. Menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak.
5. Menyebarkan penghasilan menjadi beberapa tahun yang mencegah penghasilan tersebut ke dalam kategori pendapatan yang tarifnya tinggi.

Menurut Zain (2008) ada empat hal pokok yang harus diperhatikan dalam mengelola perpajakan, yaitu:

1. Pemahaman mengenai masalah perpajakan hendaknya jangan dibatasi kepada pemahaman Undang-Undang pajak saja, tetapi juga harus meliputi Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), Surat Keputusan Menteri Keuangan, Surat Keputusan/Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Hal ini berarti bahwa seorang perencana pajak harus memiliki kemampuan untuk menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam situasi kehidupan riil.
2. Apabila terjadi aplikasi yang benar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan hasilnya menyimpang dari teori atau ketentuan akuntansi, ekonomi, sosial, dan moral sekalipun, maka yang harus diikuti adalah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Bahasa yang digunakan dalam surat keputusan atau surat edaran yang merupakan interpretasi resmi Undang-Undang pajak atau semacam petunjuk pelaksanaannya. Pengungkapan secara verbal merupakan hal yang kritis, misalnya suatu pengertian yang sama dalam pembicaraan sehari-hari dapat didefinisikan berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Teknik strategi penghindaran pajak merupakan kombinasi antara kepentingan bisnis dan strategi penghindaran pajak yang menguntungkan kedua belah pihak.

2.1.9. Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang di harapkan, maka perencanaan itu seharusnya dilakukan melalui berbagai tahapan. Adapun tahap-tahap dalam membuat perencanaan pajak menurut Suandy (2008) adalah sebagai berikut:

a. Analisis informasi yang ada

Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien.

b. Buat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih tindakan berikut:

1. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional.
2. Pemilihan dari negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut.
3. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan.

c. Evaluasi pelaksanaan rencana pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategik perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak. Perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Variabel-variabel tersebut akan dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut:

- 1) Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan
- 2) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik
- 3) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tapi gagal

Dari ketiga hipotesis tersebut akan mengeluarkan hasil yang berbeda. Kemudian berdasarkan hasil tersebut barulah dapat ditentukan apakah perencanaan pajak tersebut layak untuk dilaksanakan atau tidak.

d. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak

Hasil suatu perencanaan pajak harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Keputusan terbaik perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perpajakan. Tindakan perubahan harus tetap dijalankan, walaupun diperlukan penambahan beban atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak (*tax saving*) yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan. Karena bagaimana pun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal. Jadi tetap akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan pemberian gambaran/perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa potensial laba yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan.

e. Mutakhirkan rencana pajak

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, namun juga masih perlu memperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari Undang-Undang maupun pelaksanaannya di negara dimana aktivitas tersebut dilakukan yang mungkin mempunyai dampak terhadap komponen dari suatu perjanjian, yang berkenaan dengan perubahan yang terjadi diluar negeri atas berbagai macam pajak maupun aktivitas informasi bisnis yang tersedia sangat terbatas. Pemuktahiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

BAB 3

PROFIL PERUSAHAAN

3.1. Profil Perusahaan

PT RBA merupakan perusahaan kontraktor tambang bidang batu bara yang berdiri di Indonesia pada tanggal 19 Februari 1981. Awalnya PT RBA bergerak di bidang servis kontrak alat-alat berat untuk tambang, seperti *excavator*, dan atau *bulldozer* serta sebagai penyedia suku cadangnya. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan alat berat di dalam negeri yang pesat, PT RBA membentuk divisi penyewaan alat berat dan kontraktor di tahun 1985. Pada 27 Maret 1986 PT RBA ditunjuk sebagai agen tunggal untuk pemasaran suku cadang alat-alat merk Kobelco oleh Kobelco International(s) CO, Pte. Ltd (KISCO) Jepang hingga tahun 1998. Kiprah divisi penyewaan alat berat diawali dengan jasa penyewaan *bulldozer* dan *excavator* untuk kebutuhan penambangan PT Tambang Batubara Bukit Asam persero di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Pada tahun berikutnya divisi ini mulai menerima permintaan dari perusahaan dan kontraktor lain untuk pengadaan alat berat dari PT Jaya Konstruksi MP, PT Caltex Pacific Indonesia, dll. Pada tahun 1991 divisi penyewaan alat berat dan kontraktor mulai menerima proyek pembangunan konstruksi dan menjadi subkontraktor JO Jaya Obayashi dalam pembangunan proyek PLTU Paiton. Hingga saat ini, PT RBA telah memiliki dan mengoperasikan sejumlah besar unit kecil hingga besar yang tersebar di berbagai proyek di nusantara. Pada tahun 2007, PT RBA melakukan transformasi dari bisnis rental alat berat menjadi kontraktor tambang dengan proyek pertama di Site Badiwata Tanjung Redeb, Kalimantan Timur. Dilanjutkan bekerja sama dengan PT Mahakam Sumber Jaya yang berlokasi di Site Separi, Kalimantan Timur. Proyek yang sampai saat ini masih berjalan adalah proyek dengan PT THM yang berlokasi di Site Pondok Labu, Samarinda, PT DKB yang terletak di site Siluq Ngurai, dan PT BCO di site Lati yang ketiganya terletak di Kalimantan Timur.

3.2. Visi dan Misi Perusahaan

Visi dari PT RBA adalah berupaya untuk menjadi perusahaan pertambangan terkemuka di Indonesia yang memberikan pelayanan terbaik secara berkesinambungan kepada pelanggan dengan mengutamakan keselamatan kerja dan peduli lingkungan. Tujuan yang ingin dicapai oleh PT RBA adalah memberikan keunggulan layanan melalui kerendahan hati dan sinergi dalam satu *inline team* yang solid dengan kesehatan, keselamatan dan lingkungan.

Sedangkan misi dari PT RBA yaitu:

1. Memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham melalui serangkaian proses bisnis yang efektif dan efisien dengan memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peduli terhadap lingkungan.
2. Secara terus menerus meningkatkan kualitas produk sebagai bentuk pelayanan terhadap pelanggan dengan mengutamakan prinsip saling menguntungkan.
3. Karyawan sebagai aset perusahaan yang senantiasa memperoleh kesempatan peningkatan kualitas diri menuju profesionalisme dan kesejahteraan.

BAB 4

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK

Di dalam Laporan Laba Rugi dan Neraca, terdapat perkiraan-perkiraan yang sangat erat hubungannya dengan manajemen pajak. Dalam arti bahwa perkiraan-perkiraan tersebut dapat mempengaruhi besarnya jumlah pajak yang terutang, tentu saja disertai dengan ketentuan ataupun peraturan yang ada. Pada umumnya perusahaan menerapkan manajemen pajak yang dimulai dengan membuat perencanaan pajak (*tax planning*) dengan tujuan meringankan atau meminimalisasikan kewajiban atau hutang pajak yang diatur sehingga perencanaan terhadap pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia juga diharapkan dapat mengefisiensikan penggunaan dana perusahaan. Dalam menghitung Pajak Penghasilan badan, beban/beban yang dibukukan tidak semuanya diperkenankan oleh ketentuan perpajakan. Hanya beban-beban yang diatur oleh ketentuan perpajakan saja yang boleh dijadikan beban pengurang (*deductible expenses*). Hal ini diatur dalam Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Jika terdapat perbedaan dalam pengakuan beban maka dalam penghitungan Pajak Penghasilan harus terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi fiskal.

Aspek-aspek perencanaan pajak yang akan dibahas diantaranya adalah:

1. Pengadaan aset tetap.
2. Penyusutan aset tetap.
3. Beban kesehatan karyawan.
4. Pajak atas penghasilan karyawan.
5. Beban tunjangan makan.

Pembahasan dimulai dengan penjelasan kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan pada masing-masing aspek perencanaan pajak yang ada. Kemudian akan dijelaskan beberapa alternatif yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perpajakan serta perbandingan nilai yang dapat diperoleh setelah melaksanakan alternatif-

alternatif tersebut. Pembahasan akan diakhiri dengan menentukan alternatif mana yang akan diambil perusahaan, yang menghasilkan nilai *tax saving* yang tinggi sehingga perusahaan dapat menerapkan perencanaan pajak yang maksimal.

4.1. Pengadaan Aset Tetap

Sebagai perusahaan kontraktor, tentunya PT RBA mempunyai banyak aset tetap. Pengadaan aset tetap bisa dilakukan oleh perusahaan melalui tiga alternatif, yaitu pembelian secara tunai, sewa guna usaha, dan kredit investasi. Namun, pengadaan aset tetap yang dipilih oleh PT RBA adalah melalui sewa guna usaha dan kredit investasi. Adanya pilihan dalam pengadaan aset tetap memberikan peluang bagi perusahaan untuk menganalisa penghematan pajak yang diperoleh dari masing-masing alternatif tersebut yang berkaitan dengan beban-beban yang boleh dikurangkan dari penghasilan dan perbedaan suku bunga dari setiap alternatif.

4.1.1. Pembelian Tunai

Pembelian tunai berarti perusahaan harus menyediakan uang sebesar nilai aset tetap yang akan dibeli dan tidak ada kewajiban bunga yang harus dibayar perusahaan. Pada tahun 2010 salah satu aset tetap yang dibeli oleh PT RBA adalah Komatsu Dump Truck HD325-7 dengan nilai perolehan USD 495,000 atau Rp 4.460.940.000 yang diperoleh dengan kurs pada saat itu Rp 9.012. Komatsu Dump Truck HD325-7 tersebut mempunyai masa manfaat sebesar 16 tahun.

Jika perusahaan melakukan pembelian Komatsu Dump Truck HD325-7 secara langsung, maka jumlah yang dapat dibebankan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah beban penyusutan. Besarnya beban penyusutan antara lain ditentukan oleh metode penyusutan dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Pasal 9 (2) UU No. 36 tahun 2008 menyatakan pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud di Pasal 11 atau Pasal 11A. Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa nilai penyusutan untuk Komatsu Dump Truck HD325-7 dengan metode saldo menurun adalah USD 495,000 dan nilai tunai dari akumulasi penyusutan adalah USD 293,952.59 dengan tingkat diskon 9%.

Tabel 4.1. Nilai Beban Penyusutan dengan Metode Saldo Menurun

Tahun	Metode penyusutan saldo menurun			Present Value 9% (4) = (1)x(3)
	Beban penyusutan (1)	Saldo (2)	Discount factor (3)	
1	61,875.00	433,125.00	0.91743	56,766.06
2	54,140.63	378,984.38	0.84168	45,569.08
3	47,373.05	331,611.33	0.77218	36,580.68
4	41,451.42	290,159.91	0.70843	29,365.23
5	36,269.99	253,889.92	0.64993	23,573.00
6	31,736.24	222,153.68	0.59627	18,923.28
7	27,769.21	194,384.47	0.54703	15,190.71
8	24,298.06	170,086.41	0.50187	12,194.38
9	21,260.80	148,825.61	0.46043	9,789.06
10	18,603.20	130,222.41	0.42241	7,858.19
11	16,277.80	113,944.61	0.38753	6,308.18
12	14,243.08	99,701.53	0.35553	5,063.91
13	12,462.69	87,238.84	0.32618	4,065.06
14	10,904.86	76,333.99	0.29925	3,263.24
15	9,541.75	66,792.24	0.27454	2,619.57
16	66,792.24	0.00	0.25187	16,822.95
Total	495,000.00			293,952.59

(Sumber: hasil olahan penulis)

Tabel 4.1 diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut.

(1) = Nilai saldo aset x 12.5%

(2) = Nilai aset – (1)

(3) = $\frac{1}{(1 + i)^n}$

4.1.2. Kredit Investasi

Menurut Mulyono (1989), kredit adalah suatu pembelian pengadaan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan penangguhan pada jangka waktu yang telah disepakati. Sedangkan kredit investasi adalah kredit yang dikeluarkan perbankan untuk pembelian barang-barang modal yang penggunaannya tidak habis dalam satu siklus produksi/usaha atau pengeluaran uang kas kembali menjadi uang kas membutuhkan waktu yang cukup lama melalui perputaran yang

cukup panjang. Berdasarkan Undang – Undang No. 10 tahun 1998, kredit bank adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Yang harus diperhatikan dalam pengadaan aset tetap melalui kredit investasi di bank adalah besarnya beban bunga, dan jangka waktu dari kredit tersebut. Dalam pasal 6 (1) UU No. 36 Tahun 2008 dinyatakan pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan operasional perusahaan merupakan beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sehingga atas bunganya bersifat *deductible* dalam laporan laba rugi fiskal.

Dengan nilai aset dan suku bunga yang sama seperti alternatif sebelumnya, penulis mengilustrasikan jangka waktu kredit investasi yaitu 4 tahun dengan bunga yang sama dengan ilustrasi sewa guna usaha yaitu 11%. Rincian angsuran yang harus dibayar serta bunga atas pembelian Komatsu Dump Truck HD325-7 melalui kredit investasi bisa dilihat dalam tabel 4.2.

Perhitungan besarnya beban yang boleh dibebankan sesuai dengan peraturan perpajakan adalah beban penyusutan dan beban bunga bank. Jadi total beban fiskal yang boleh dibebankan untuk pengadaan aset tetap dengan kredit investasi adalah USD 589,498.32 yang terdiri dari jumlah USD 495,000 dan USD 94,498.32. Dan nilai *present value*-nya adalah sebesar USD 380,473.99 yang diperoleh dari nilai tunai bunga USD 86,521.40 dan nilai tunai beban penyusutan sebesar USD 293,952.59.

Tabel 4.2. Skedul Pembayaran Kredit Investasi dan nilai *Present Valuenya*

No.	Sisa Hutang Pokok	Angsuran		Angsuran perbulan	Discount factor	PV Angsuran Bunga	PV Angsuran Pokok
		Pokok	Bunga				
1	495,000.00	0.00	4,537.50	4,537.50	1.00000	4,537.50	0.00
2	495,000.00	0.00	4,537.50	4,537.50	0.99256	4,503.72	0.00
3	495,000.00	0.00	4,537.50	4,537.50	0.98517	4,470.20	0.00
4	482,086.41	12,913.59	4,537.50	17,451.09	0.97783	4,436.92	12,627.33
5	469,054.45	13,031.96	4,419.13	17,451.09	0.97055	4,289.00	12,648.22
6	455,903.03	13,151.42	4,299.67	17,451.09	0.96333	4,141.99	12,669.15
7	442,631.06	13,271.97	4,179.11	17,451.09	0.95616	3,995.89	12,690.10
8	429,237.43	13,393.63	4,057.45	17,451.09	0.94904	3,850.68	12,711.10
9	415,721.02	13,516.41	3,934.68	17,451.09	0.94198	3,706.37	12,732.12
10	402,080.71	13,640.31	3,810.78	17,451.09	0.93496	3,562.94	12,753.19
11	388,315.36	13,765.35	3,685.74	17,451.09	0.92800	3,420.38	12,774.28
12	374,423.83	13,891.53	3,559.56	17,451.09	0.92109	3,278.69	12,795.42
13	360,404.97	14,018.87	3,432.22	17,451.09	0.91424	3,137.87	12,816.58
14	346,257.59	14,147.37	3,303.71	17,451.09	0.90743	2,997.90	12,837.79
15	331,980.54	14,277.06	3,174.03	17,451.09	0.90068	2,858.78	12,859.02
16	317,572.61	14,407.93	3,043.15	17,451.09	0.89397	2,720.50	12,880.29
17	303,032.60	14,540.00	2,911.08	17,451.09	0.88732	2,583.05	12,901.60
18	288,359.32	14,673.29	2,777.80	17,451.09	0.88071	2,446.44	12,922.94
19	273,551.52	14,807.79	2,643.29	17,451.09	0.87416	2,310.65	12,944.32
20	258,607.99	14,943.53	2,507.56	17,451.09	0.86765	2,175.68	12,965.74
21	243,527.48	15,080.51	2,370.57	17,451.09	0.86119	2,041.51	12,987.18
22	228,308.73	15,218.75	2,232.34	17,451.09	0.85478	1,908.15	13,008.67
23	212,950.48	15,358.26	2,092.83	17,451.09	0.84842	1,775.59	13,030.19
24	197,451.44	15,499.04	1,952.05	17,451.09	0.84210	1,643.82	13,051.74
25	181,810.32	15,641.11	1,809.97	17,451.09	0.83583	1,512.83	13,073.33
26	166,025.83	15,784.49	1,666.59	17,451.09	0.82961	1,382.62	13,094.96
27	150,096.65	15,929.18	1,521.90	17,451.09	0.82343	1,253.19	13,116.62
28	134,021.45	16,075.20	1,375.89	17,451.09	0.81730	1,124.52	13,138.32
29	117,798.90	16,222.56	1,228.53	17,451.09	0.81122	996.61	13,160.06
30	101,427.63	16,371.26	1,079.82	17,451.09	0.80518	869.45	13,181.83
31	84,906.30	16,521.33	929.75	17,451.09	0.79919	743.05	13,203.63
32	68,233.52	16,672.78	778.31	17,451.09	0.79324	617.38	13,225.47
33	51,407.91	16,825.61	625.47	17,451.09	0.78733	492.46	13,247.35
34	34,428.07	16,979.85	471.24	17,451.09	0.78147	368.26	13,269.27
35	17,292.57	17,135.49	315.59	17,451.09	0.77565	244.79	13,291.22
36	0.00	17,292.57	158.52	17,451.09	0.76988	122.04	13,313.21
	TOTAL	495,000.00	94,498.32	589,498.32		86,521.40	427,922.26

(Sumber: hasil olahan penulis)

Dari tabel 4.1 dan 4.2 dapat ditarik kesimpulan dalam tabel 4.3 *tax saving* yang diperoleh PT RBA adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3. *Tax saving* dalam alternatif kredit investasi

Keterangan	Kredit investasi (bunga 11%)	
	Nominal	PV (9%)
Harga perolehan		
Lease fee		
Nilai opsi		
Harga aset tetap	495,000.00	427,922.26
Jumlah	495,000.00	427,922.26
Beban yang boleh dikurangkan		
Lease fee		
Beban penyusutan	495,000.00	293,952.59
Beban bunga	94,498.32	86,521.40
Beban penyusutan setelah masa leasing		
Total	589,498.32	380,473.99
Tax saving (25%)	147,374.58	95,118.50
Penurunan laba (1-tax rate)	442,123.74	285,355.49

(Sumber: hasil olahan penulis)

4.1.3. Sewa Guna Usaha

Sewa guna usaha adalah suatu kontrak antara *lessor* (pemilik barang modal) dengan *lessee* (pengguna barang modal), dimana *lessor* memberikan hak kepada *lessee* untuk menggunakan barang modal selama jangka waktu tertentu dengan suatu imbalan berkala dari *lessee* yang besarnya tergantung dari perjanjian dan *lessee* dapat diberikan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut pada akhir masa kontrak.

Apabila perusahaan membeli aset tetap secara sewa guna usaha, maka semua beban yang dikeluarkan untuk membayar sewa guna usaha tersebut dapat dibebankan pada tahun yang bersangkutan. Masa sewa guna usaha bisa lebih pendek dari umur ekonomis sehingga perusahaan dapat membebaskan perolehan aset tetap lebih cepat dibandingkan apabila menggunakan penyusutan (penyusutan yang dipercepat). Masa sewa guna usaha ditentukan sekurang-kurangnya dua tahun untuk barang modal golongan I, tiga tahun untuk barang modal golongan II dan III, dan tujuh tahun untuk golongan bangunan. Tingkat suku bunga sewa guna usaha rata-rata adalah 10% di atas bunga pinjaman, karena sebagian besar perusahaan sewa guna usaha sumber

dananya berasal dari pinjaman bank. Dengan adanya perbedaan suku bunga tersebut pasti akan mempengaruhi beban dan yang pasti bunga yang besar akan mempengaruhi besarnya beban.

Jenis sewa guna usaha yang dipakai PT RBA dalam pembelian Komatsu Dump Truck HD325-7 adalah *finance lease* dimana penyewa (*lessee*) dalam hal ini adalah PT RBA pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Tingkat bunga sewa guna usaha yang akan dipakai dalam ilustrasi ini adalah 11% dan tingkat diskon 9% dengan jangka waktu sewa 3 tahun dan jaminan (*security deposit*) sama dengan nilai opsi yaitu 30% dari nilai USD 495,000 yang disewagunahgunakan yaitu USD 148,500, maka nilai sewa guna usaha adalah USD 346,500 dengan masa *grace period* 3 bulan diperoleh perhitungan angsuran beban sewa yang harus dibayar setiap bulannya seperti dalam tabel 4.4.

Tabel 4.4 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

PV = Nilai sewa guna usaha (USD 346,500)

i = Tingkat bunga per bulan = $11\%/12 = 0.92\%$

d = Tingkat diskon per bulan = $9\%/12 = 0.75\%$

n = jangka waktu – *grace period* = 33

Bunga = $i \times PV_{ke-0}$

Angsuran per bulan = $\frac{PV @ i}{1 - (1 - i)^{3n}}$

Angsuran pokok = Angsuran per bulan – Bunga per bulan

Discount factor = $\frac{1}{(1 - d)^{n+1}}$

Tabel 4.4. Skedul Pembayaran Sewa Guna Usaha dan nilai *Present Valuenya*

No.	Sisa Hutang Pokok	Angsuran		Angsuran perbulan	Discount factor	PV Beban Leasing
		Pokok	Bunga			
1	346,500.00	0.00	3,176.25	3,176.25	1.00000	3,176.25
2	346,500.00	0.00	3,176.25	3,176.25	0.99256	3,152.61
3	346,500.00	0.00	3,176.25	3,176.25	0.98517	3,129.14
4	337,460.49	9,039.51	3,176.25	12,215.76	0.97783	11,944.98
5	328,338.12	9,122.37	3,093.39	12,215.76	0.97055	11,856.06
6	319,132.12	9,205.99	3,009.77	12,215.76	0.96333	11,767.80
7	309,841.74	9,290.38	2,925.38	12,215.76	0.95616	11,680.20
8	300,466.20	9,375.54	2,840.22	12,215.76	0.94904	11,593.25
9	291,004.71	9,461.49	2,754.27	12,215.76	0.94198	11,506.95
10	281,456.50	9,548.22	2,667.54	12,215.76	0.93496	11,421.29
11	271,820.75	9,635.74	2,580.02	12,215.76	0.92800	11,336.26
12	262,096.68	9,724.07	2,491.69	12,215.76	0.92109	11,251.87
13	252,283.48	9,813.21	2,402.55	12,215.76	0.91424	11,168.11
14	242,380.32	9,903.16	2,312.60	12,215.76	0.90743	11,084.98
15	232,386.38	9,993.94	2,221.82	12,215.76	0.90068	11,002.46
16	222,300.82	10,085.55	2,130.21	12,215.76	0.89397	10,920.55
17	212,122.82	10,178.00	2,037.76	12,215.76	0.88732	10,839.26
18	201,851.52	10,271.30	1,944.46	12,215.76	0.88071	10,758.57
19	191,486.07	10,365.45	1,850.31	12,215.76	0.87416	10,678.48
20	181,025.60	10,460.47	1,755.29	12,215.76	0.86765	10,598.99
21	170,469.24	10,556.36	1,659.40	12,215.76	0.86119	10,520.09
22	159,816.11	10,653.13	1,562.63	12,215.76	0.85478	10,441.78
23	149,065.33	10,750.78	1,464.98	12,215.76	0.84842	10,364.04
24	138,216.01	10,849.33	1,366.43	12,215.76	0.84210	10,286.89
25	127,267.23	10,948.78	1,266.98	12,215.76	0.83583	10,210.32
26	116,218.08	11,049.14	1,166.62	12,215.76	0.82961	10,134.31
27	105,067.66	11,150.43	1,065.33	12,215.76	0.82343	10,058.87
28	93,815.02	11,252.64	963.12	12,215.76	0.81730	9,983.99
29	82,459.23	11,355.79	859.97	12,215.76	0.81122	9,909.66
30	70,999.34	11,459.88	755.88	12,215.76	0.80518	9,835.90
31	59,434.41	11,564.93	650.83	12,215.76	0.79919	9,762.68
32	47,763.47	11,670.94	544.82	12,215.76	0.79324	9,690.00
33	35,985.54	11,777.93	437.83	12,215.76	0.78733	9,617.87
34	24,099.65	11,885.89	329.87	12,215.76	0.78147	9,546.27
35	12,104.80	11,994.85	220.91	12,215.76	0.77565	9,475.21
36	0.00	12,104.80	110.96	12,215.76	0.76988	9,404.67
	TOTAL	346,500.00	66,148.82	412,648.82		360,110.56

(Sumber: hasil olahan penulis)

Angsuran yang harus dibayar PT RBA setiap bulannya adalah USD 12,215.76 yang merupakan jumlah dari angsuran pokok dan bunganya. Perhitungan besarnya beban yang boleh dibebankan sesuai dengan peraturan perpajakan dalam KMK No. 1169/KMK.01/1991 Pasal 16 (1) adalah semua beban yang berkenaan dengan perolehan aset tetap dengan cara sewa guna usaha termasuk didalamnya adalah angsuran pokok dan angsuran bunga sewa guna usaha. Beban penyusutan mesin bisa dilakukan oleh perusahaan setelah berakhirnya masa sewa guna usaha dengan jumlah sebesar nilai opsi yaitu USD 148,500.

Dengan demikian, nilai beban pembelian mesin yang boleh dibebankan dengan cara sewa guna usaha adalah USD 561,148.82 yang diperoleh dari jumlah beban sewa guna usaha USD 412,648.82 dan beban penyusutan USD 148,500. Sedangkan nilai tunai sewa guna usaha dengan tingkat diskon 11% adalah sebesar USD 427,834.28 yang diperoleh dari nilai tunai beban sewa guna usaha sebesar USD 360,110.56 dan dengan nilai tunai beban penyusutan sebesar USD 67,723.71 yang diperoleh dari tabel 4.5.

Tabel 4.5. Nilai Penyusutan Setelah Masa Sewa Guna Usaha Berakhir

Tahun	Metode penyusutan saldo menurun			Present Value 9% (4) = (1)x(3)
	Beban penyusutan (1)	Saldo (2)	Discount factor (3)	
4	18,562.50	129,937.50	0.70843	13,150.14
5	16,242.19	113,695.31	0.64993	10,556.31
6	14,211.91	99,483.40	0.59627	8,474.10
7	12,435.42	87,047.97	0.54703	6,802.60
8	10,881.00	76,166.98	0.50187	5,460.81
9	9,520.87	66,646.10	0.46043	4,383.67
10	8,330.76	58,315.34	0.42241	3,519.00
11	7,289.42	51,025.92	0.38753	2,824.89
12	6,378.24	44,647.68	0.35553	2,267.69
13	5,580.96	39,066.72	0.32618	1,820.39
14	4,883.34	34,183.38	0.29925	1,461.32
15	4,272.92	29,910.46	0.27454	1,173.08
16	3,738.81	26,171.65	0.25187	941.69
17	3,271.46	22,900.20	0.23107	755.95
19	2,862.52	20,037.67	0.19449	556.73
20	20,037.67	0.00	0.17843	3,575.34
Total	148,500.00			67,723.71

(Sumber: hasil olahan penulis)

Tabel 4.5 menunjukkan penyusutan yang dilakukan oleh PT. RBA setelah masa sewa guna usaha selesai. Tabel di atas diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

$$(1) = \text{Nilai saldo aset} \times 12.5\%$$

$$(2) = \text{Nilai aset} - (1)$$

$$(3) = \frac{1}{(1 + i)^n}$$

Dari tabel 4.4 dan 4.5 dapat ditarik kesimpulan dalam tabel 4.6 *tax saving* yang diperoleh PT RBA adalah sebagai berikut.

Tabel 4.6. *Tax saving* dalam alternatif sewa guna usaha (*leasing*)

Keterangan	Sewa guna usaha (bunga 11%)	
	Nominal	PV (9%)
Harga perolehan		
Lease fee	412,648.82	360,110.56
Nilai opsi	148,500.00	67,723.71
Harga aset tetap		
Jumlah	561,148.82	427,834.28
Beban yang boleh dikurangkan		
Lease fee	412,648.82	360,110.56
Beban penyusutan		
Beban bunga		
Beban penyusutan setelah masa leasing	148,500.00	67,723.71
Total	561,148.82	427,834.28
Tax saving (25%)	140,287.21	106,958.57
Penurunan laba (1-tax rate)	420,861.62	320,875.71

(Sumber: hasil olahan penulis)

4.1.4. Analisis Alternatif Pengadaan Aset Tetap yang Sebaiknya Dipilih

Sebelum menentukan alternatif mana yang sebaiknya dipilih, terlebih dahulu penulis akan melakukan perhitungan harga perolehan dan penghematan pajak baik secara nominal maupun nilai tunai (*present value*) untuk ketiga alternatif. Hasil perhitungan bisa dilihat pada tabel 4.7.

Angka yang digunakan sebagai analisis pada tabel 4.7 adalah *present value* untuk masing-masing ketentuan, guna meninjau besarnya *deductible expense* atas proyeksi tahun mendatang di masa sekarang.

Tabel 4.7. Perbandingan Pembelian Tunai, Kredit Bank, dan Sewa Guna Usaha

Keterangan	Tunai		Kredit investasi (bunga 11%)		Sewa guna usaha (bunga 11%)	
	Nominal	PV (9%)	Nominal	PV (9%)	Nominal	PV (9%)
Harga perolehan						
Lease fee					412,648.82	360,110.56
Uang muka					148,500.00	67,723.71
Harga aset tetap	495,000.00	495,000.00	495,000.00	427,922.26		
Jumlah	495,000.00	495,000.00	495,000.00	427,922.26	561,148.82	427,834.28
Beban yang boleh dikurangkan						
Lease fee					412,648.82	360,110.56
Beban penyusutan	495,000.00	293,952.59	495,000.00	293,952.59		
Beban bunga			94,498.32	86,521.40		
Beban penyusutan setelah masa leasing					148,500.00	67,723.71
Total	495,000.00	293,952.59	589,498.32	380,473.99	561,148.82	427,834.28
Tax saving (25%)	123,750.00	73,488.15	147,374.58	95,118.50	140,287.21	106,958.57
Penurunan laba	371,250.00	220,464.44	442,123.74	285,355.49	420,861.62	320,875.71

(Sumber: hasil olahan penulis)

Perusahaan lebih baik melihat dari nilai *present value* dalam mengambil keputusan pembebanan mana yang lebih menguntungkan ditinjau dari aspek perpajakannya. Penghematan pajak yang diperoleh perusahaan dengan bunga sewa guna usaha 11% dan tingkat diskon 9% menghasilkan *tax saving* yang lebih kecil USD 140,287.21 dibandingkan dengan kredit investasi yaitu sebesar USD 147,374.58. Ketika melihat faktor *time value of money* atas perhitungan pengadaan aset tetap, perusahaan memperoleh *tax saving* yang lebih besar dengan alternatif sewa guna usaha dibandingkan dengan kredit investasi, yaitu sebesar USD 11,840.07 yang diperoleh dari selisih atas nilai tunai *tax saving* sewa guna usaha USD 106,958.57 dan nilai tunai *tax saving* kredit investasi USD 95,118.50. Diantara tiga alternatif pengadaan aset tetap yang telah diuji, dapat diperoleh kesimpulan alternatif pengadaan aset tetap dengan sewa guna usaha dengan menggunakan tingkat bunga pinjaman dan jangka waktu yang sama dengan kredit investasi, akan memberikan *tax saving* yang terbesar dibandingkan dengan kredit investasi dan pembelian secara tunai dengan memasukan faktor *present value*.

4.2. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset tetap yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi (PSAK 17). Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aset tetap tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aset tetap dibebankan secara bertahap. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU PPh bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan. Mulai tahun 1995 ketentuan fiskal mengharuskan penyusutan aset tetap dilakukan secara individual per aset tetap, tidak lagi secara gabungan (berdasarkan golongan) seperti yang berlaku sebelumnya kecuali untuk alat-alat kecil yang sama atau sejenis masih boleh menggunakan penyusutan secara golongan. UU PPh secara khusus dan eksplisit menetapkan saat dimulainya penyusutan fiskal adalah pada bulan perolehan dan harus dilakukan sebulan penuh. Untuk aset tetap dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada tahun selesainya pekerjaan tersebut. Dan untuk penyusutan terhadap aset tetap dalam sewa guna usaha khususnya sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) dimulai pada bulan aset tersebut disewagunausahakan, sedangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) penyusutannya dilakukan pada bulan setelah berakhirnya angsuran sewa guna usaha. Di dalam penyusutan, terdapat dua metode yang mempengaruhi besarnya beban penyusutan atas aset yang bersangkutan, yaitu metode garis lurus (*straight line*) dan metode saldo menurun (*declining balance*). Untuk aset bangunan dipergunakan metode garis lurus. Mulai tahun 1995 Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal untuk aset tetap berwujud bukan bangunan yaitu metode saldo menurun ganda atau metode garis lurus. Metode yang dipilih harus diterapkan terhadap seluruh kelompok harta.

Tarif penyusutan untuk aset tetap bukan bangunan dapat dilihat dalam tabel 4.8 dan tarif penyusutan untuk aset tetap berupa bangunan dalam tabel 4.9.

Tabel 4.8. Tarif Penyusutan untuk Aset Tetap Bukan Bangunan

Kelompok bukan bangunan	Tarif penyusutan	
	Metode garis lurus	Metode saldo menurun
Kelompok 1	25.00%	50.00%
Kelompok 2	12.50%	25.00%
Kelompok 3	6.25%	12.50%
Kelompok 4	5.00%	10.00%

(Sumber: Suandy, 2011)

Tabel 4.9. Tarif Penyusutan untuk Aset Tetap Berupa Bangunan

Kelompok bangunan	Tarif penyusutan (metode garis lurus)
Bangunan permanen	5%
Bangunan tidak permanen	10%

(Sumber: Suandy, 2011)

Penyusutan yang dicatat oleh PT RBA dihitung dengan metode garis lurus. Dengan metode garis lurus, beban penyusutan akan sama setiap tahunnya kecuali bila ada penambahan atau pengurangan aset tetap. Penulis akan mengilustrasikan penyusutan pada mobil avanza yang nilai perolehannya sebesar Rp 127.169.545 dengan metode garis lurus dan metode saldo menurun. Dalam tabel 4.10 dapat dilihat beban penyusutan setiap tahun atas mobil avanza, dan besarnya beban penyusutan berbeda-beda setiap tahunnya tetapi pada akhir masa manfaat jumlah akumulasi penyusutan adalah sama. Adanya perbedaan besarnya beban penyusutan ini dikenal dengan istilah beda waktu/beda sementara (*timing difference/temporary difference*).

Tabel 4.10. Nilai Beban Penyusutan Avanza

Tahun	Metode penyusutan	
	Garis lurus	Saldo menurun
1	31,792,386	63,584,773
2	31,792,386	31,792,386
3	31,792,386	15,896,193
4	31,792,386	15,896,193
Akumulasi penyusutan	127,169,545	127,169,545

(Sumber: hasil olahan penulis)

Apabila nilai beban penyusutan ditinjau dari nilai tunai (*present value*), maka jumlahnya akan menjadi berbeda. Dalam tabel 4.11 dapat dilihat *present value* nilai penyusutan mobil dengan asumsi tingkat suku bunga 9%.

Tabel 4.11. Nilai Beban Penyusutan dan Nilai *Present Valuenya*

Tahun	Metode penyusutan				
	Garis lurus		Saldo menurun		Tingkat diskon 9%
	Garis lurus	PV	Saldo menurun	PV	
1	31,792,386.25	29,167,326.83	63,584,772.50	58,334,653.67	0.917431
2	31,792,386.25	26,759,015.44	31,792,386.25	26,759,015.44	0.841680
3	31,792,386.25	24,549,555.45	15,896,193.13	12,274,777.73	0.772183
4	31,792,386.25	22,522,527.94	15,896,193.13	11,261,263.97	0.708425
	127,169,545.00	102,998,425.67	127,169,545.00	108,629,710.81	

(Sumber: hasil olahan penulis)

4.2.1. Analisis Perencanaan Pajak pada Penyusutan Aset Tetap

Dari tabel 4.12 dapat diambil kesimpulan bahwa dengan melihat nilai tunainya, metode penyusutan yang menghasilkan penghematan pajak terbesar adalah metode saldo menurun. Dengan nilai beban penyusutan yang lebih besar akan mengakibatkan beban pengeluaran kas perusahaan yang digunakan untuk pembayaran kewajiban pajak badan tahunan menjadi berkurang. Dalam tabel 4.12 ditunjukkan besarnya penghematan pajak yang dilakukan jika tarif pajak yang dikenakan sebesar 25% dan dengan tingkat diskon 9% adalah sebesar Rp 27.157.427 – Rp 25.749.606 = Rp 1.407.821

Tabel 4.12. Perbandingan Penghematan Pajak atas Nilai Beban Penyusutan

Keterangan	Garis lurus		Saldo menurun	
	Nominal	PV	Nominal	PV
Harga perolehan	127,169,545.00	127,169,545.00	127,169,545.00	127,169,545.00
Beban penyusutan	127,169,545.00	102,998,425.67	127,169,545.00	108,629,710.81
Tax saving PPh 25%	31,792,386.25	25,749,606.42	31,792,386.25	27,157,427.70

(Sumber: hasil olahan penulis)

4.3. Beban Kesehatan Karyawan

PT RBA memberikan fasilitas kesehatan kepada karyawannya dalam bentuk:

1. Rawat inap
2. Beban pengobatan rawat jalan

Untuk fasilitas kesehatan berupa rawat inap, perusahaan mengasuransikan karyawan kedalam asuransi kesehatan dan membayarkan preminya setiap bulan. Atas pembayaran premi asuransi untuk rawat inap karyawan, pembayaran tersebut dimasukan sebagai tambahan penghasilan dalam perhitungan gaji karyawan. Setiap karyawan diberikan kartu dari perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan PT RBA untuk pengobatan dalam bentuk rawat inap dan dibebaskan memilih Rumah Sakit untuk berobat rawat inap dari daftar Rumah Sakit yang bekerjasama dengan perusahaan asuransi. Apabila karyawan atau anggota keluarganya menderita sakit sampai harus dirawat inap, maka karyawan dapat menunjukkan kartu berobat dari asuransi tersebut dan dapat berobat tanpa dipungut beban apapun.

Dalam hal beban pengobatan rawat jalan, karyawan dapat menggunakan tunjangan kesehatan dari perusahaan yang memberikan penggantian penuh beban berobat rawat jalan karyawan dari Rumah Sakit apabila dapat menunjukkan bukti-bukti pembayaran asli dari Rumah Sakit. Dan apabila penggantian atas beban pengobatan lebih kecil dari tunjangan yang diberikan dari perusahaan kepada karyawan selama satu tahun, maka sisa dari tunjangan kesehatan tersebut akan diberikan ke karyawan pada awal tahun berikutnya.

4.3.1. Analisis Perencanaan Pajak pada Beban Kesehatan Karyawan

Perusahaan mengeluarkan beban kesehatan untuk karyawan selama tahun 2010 sebesar Rp 551.074.402 untuk pembayaran premi asuransi dan beban pengobatan rawat jalan karyawan. Jumlah beban tersebut dapat dibebankan oleh perusahaan karena beban kesehatan tersebut dilengkapi bukti dokumen asli pembayaran beban berobat sehingga dapat menjadi pengurang dari penghasilan kena pajak. Berdasarkan pasal 9 huruf e UU PPh (UU No.36 Tahun 2008) disebutkan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa selama tidak dalam bentuk natura dan kenikmatan, maka perusahaan dapat membebaskan beban kesehatan tersebut. Begitu pula atas pembayaran rumah sakit bagi karyawan yang rawat inap dan menggunakan kartu asuransi, dalam pasal 9 huruf d UU PPh

disebutkan bahwa premi asuransi kesehatan selama dibayarkan oleh pemberi kerja dan atas premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi karyawan maka beban premi tersebut bersifat *deductible*.

Kebijakan perusahaan untuk memberikan tunjangan kesehatan berupa penggantian beban pengobatan berdasarkan *invoice* atau kuitansi sebagai bukti dokumen asli pembayaran dan pembayaran premi asuransi adalah tindakan yang tepat dari segi manajemen pajak. Karena tunjangan kesehatan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya dalam bentuk penggantian beban pengobatan dan uang tunjangan premi asuransi merupakan beban yang dapat dikurangkan (*deductible*) dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Bagi karyawan tunjangan kesehatan tersebut merupakan tambahan penghasilan bagi dirinya yang masuk sebagai objek PPh pasal 21 karyawan sedangkan perusahaan dapat membebaskan pengeluaran tunjangan tersebut (*deductible*). Natura yang diberikan dalam bentuk tunjangan jika mengacu pada pasal 1 No. 15 dan 16 peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan, adalah bahwa segala macam tunjangan merupakan penghasilan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawai tetap yang bersifat teratur maupun tidak teratur.

4.4. Pajak atas Penghasilan Karyawan

Perusahaan menanggung pajak penghasilan karyawan (PPh Pasal 21) untuk mengurangi beban karyawan sehingga karyawan dapat membawa pulang gajinya tanpa dipotong pajak. Struktur penghasilan karyawan sendiri terdiri dari gaji pokok, tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan kesehatan, dan tunjangan Jamsostek. PT RBA memperlakukan pajak penghasilan karyawan sebagai pajak yang ditanggung perusahaan. Beban pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada karyawan sebesar Rp 929.342.178,-

4.4.1. Analisis Perencanaan Pajak pada Pajak atas Penghasilan Karyawan

Pada umumnya perusahaan mempunyai tiga alternatif perlakuan terhadap pajak atas penghasilan karyawan. Alternatif tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan menanggung pajak penghasilan atas karyawan tanpa memberikan tunjangan pajak.

Dengan alternatif ini, perusahaan membayar sendiri PPh Pasal 21 atas karyawan yang terutang dan PPh Pasal 21 yang dibayar oleh perusahaan tidak dimasukkan sebagai unsur penghasilan karyawan saat perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan. Karyawan akan menerima gaji tanpa dikurangi pajak. UU PPh Pasal 9 dan Pasal 7 huruf e KEP 545/PJ/2000 menggolongkan pajak ditanggung pemberi kerja sebagai kenikmatan (*benefit in kind*), sehingga pajak penghasilan atas karyawan ini tidak diperbolehkan menjadi beban. Oleh karena itu PT RBA yang mengambil alternatif ini tidak dapat menjadikan beban pajak penghasilan karyawan sebagai beban dalam akuntansi fiskal sehingga akan mengakibatkan beban PPh Pasal 21 yang dibayarkan menjadi lebih kecil, namun beban PPh pasal 21 tersebut terkoreksi sehingga akan mengakibatkan penghasilan kena pajak perusahaan menjadi lebih besar. Karyawan yang pajaknya ditanggung oleh perusahaan akan menerima gaji bulanan penuh tanpa dikurangi pajak, dan perusahaan yang akan membayarkan beban pajak karyawannya ke Kas Negara. Secara akuntansi, transaksi ini akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

Biaya gaji	2,000,000	
Bank		2,000,000
Biaya pajak	100,000	
Utang PPh 21		100,000

2. Pajak atas penghasilan karyawan diperlakukan sebagai tunjangan pajak penghasilan karyawan yang menambah penghasilan karyawan.

Penerapan metode ini tidak menghilangkan kewajiban pemotongan PPh 21 atas penghasilan karyawan dimana PPh pasal 21 tetap dipotong dari penghasilan karyawan. Dengan kata lain, perusahaan tetap menanggung PPh pasal 21 atas karyawan namun tanggungan tersebut diberikan melalui pemberian tunjangan PPh pasal 21. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, tunjangan PPh Pasal 21 merupakan penghasilan bagi karyawan yang menerimanya dan menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21. Apabila PT RBA memberikan tunjangan pajak penghasilan atas karyawan dengan metode perhitungan *gross up* atas gaji karyawan, maka PT RBA akan memberikan seluruh tunjangan dalam bentuk uang namun PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh karyawan akan sama besar dengan jumlah tunjangan PPh Pasal 21 yang diberikan

oleh perusahaan. Dengan cara ini, PPh Pasal 21 yang sebenarnya ditanggung oleh perusahaan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam unsur gaji dan tunjangan kepada karyawan saat penghitungan PPh Pasal 21 dilakukan. Kemudian PPh Pasal 21 atas karyawan tersebut dipotong oleh perusahaan. Tunjangan pajak penghasilan ini dapat dibebankan dalam laporan laba rugi fiskal. Dengan perhitungan *gross up* atas tunjangan pajak, karyawan akan menerima gaji bersih sedangkan atas beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan akan sama dengan angka tunjangan pajak penghasilan. Jurnal yang dihasilkan dari transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Biaya gaji	2,000,000	
Tunjangan pajak	100,000	
Bank		2,000,000
Utang PPh 21		100,000

3. Perusahaan juga dapat memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada sebagian karyawannya dan sebagian lagi ditanggung oleh perusahaan pajak penghasilannya.

Apabila perusahaan mengambil alternatif ketiga yaitu menanggung pajak sebagian karyawannya dan menanggung pajak sebagian karyawan lainnya akan menghasilkan total beban pajak yang lebih kecil dibanding dengan apabila perusahaan menanggung pajak seluruh karyawannya. Dan secara jumlah total beban pajak (PPh 21 karyawan dan PPh 21 badan) yang dikeluarkan, perusahaan memberikan total pengeluaran yang lebih sedikit dibanding alternatif lainnya. Pajak penghasilan karyawan ditanggung perusahaan dan tunjangan pajak penghasilan adalah dua perkataan yang mirip tetapi maknanya sangat berbeda. Pajak penghasilan ditanggung perusahaan merupakan beban (*deductible*) secara akuntansi komersial tetapi bukan beban (*non deductible*) bagi akuntansi fiskal maka dilakukan koreksi fiskal positif. Sedangkan tunjangan pajak penghasilan bagi perusahaan adalah beban (*deductible*) tetapi bagi karyawan adalah penghasilan sehingga merupakan objek PPh Pasal 21. Perusahaan yang mengambil alternatif ini akan mencatat jurnal sebagai berikut:

Biaya gaji	2,000,000	
Tunjangan PPh 21	63,000	
Biaya pajak	37,000	
Bank		2,000,000
Utang PPh 21		100,000

Dalam tabel 4.13 penulis menyajikan rincian penghasilan karyawan yang ditanggung oleh PT RBA. Selanjutnya, dalam tabel 4.14 akan dijabarkan rincian penghasilan karyawan dari PT RBA beserta nilai tunjangan pajak yang dihitung secara *gross up* sesuai dengan kebijakan yang diterapkan. Dan pada tabel 4.15 penulis mencoba mengelompokkan penghasilan karyawan berdasarkan pada sebaran penghasilan yang ada di PT RBA. Penghasilan karyawan PT RBA terdapat pada *bracket* ke-4, yaitu pada tarif 30% yang dikenakan atas penghasilan karyawannya. Tarif tersebut merupakan *bracket* tertinggi dari tarif yang dikenakan terhadap penghasilan kena pajaknya. Dalam Pasal 17 UU Pajak Penghasilan (UU No. 36 Tahun 2008) tarif 30% mencakup penghasilan yang jumlahnya diatas Rp 500.000.000,-. Penghasilan pada PT RBA yang masuk pada *bracket* tertinggi tersebut adalah penghasilan dengan gaji pokok Rp 560.748.000. Selanjutnya, penghasilan pada *bracket* tertinggi tersebut akan diaplikasikan oleh penulis sebagai pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Penghasilan yang masuk pada *bracket* 5%-25% yaitu penghasilan dengan gaji pokok Rp0–Rp500.000.000 akan masuk ke dalam kelompok karyawan yang pajaknya ditunjang oleh perusahaan melalui perhitungan *gross up*. Penulis hanya menyajikan rincian penghasilan atas 15 karyawan dalam ketiga tabel yang telah disebutkan diatas.

Selanjutnya penulis menyajikan tabel 4.16 sebagai tabel perbandingan pajak yang dibayar oleh perusahaan dengan beberapa alternatif perlakuan PPh 21. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila perusahaan menanggung sebagian pajak penghasilan atas karyawan dan menunjang sisanya, akan menghasilkan beban pajak fiskal yang lebih besar dibanding dengan apabila perusahaan menunjang pajak penghasilan karyawannya. Namun secara jumlah total beban pajak atas PPh Badan dan PPh 21 yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, alternatif ini memberikan total pengeluaran yang lebih sedikit dibanding alternatif kedua. Namun apabila perusahaan mengambil alternatif ketiga ini, yaitu menanggung pajak penghasilan karyawannya sebagian dan menunjang sisanya, perusahaan dihadapkan pada masalah yang rumit. Perusahaan harus melakukan perhitungan secara teliti dan mendokumentasikan bukti-bukti pembayaran gaji karyawan secara teratur dan rapi. Perusahaan juga diharuskan bisa memilah-milah karyawan mana yang sebaiknya diberikan tunjangan pajak dan yang sebaiknya ditanggung oleh perusahaan.

Tabel 4.13. Rincian PPh 21 Karyawan Ditanggung Perusahaan

No	Status	Gaji pokok setahun	Gaji pokok per bulan	Tunjangan lain-lain	Premi asuransi	Penghasilan bruto	Biaya jabatan	Iuran pensiun, THT, JHT	Jumlah penghasilan netto	Jumlah penghasilan netto setahun	PTKP	PKP	PPh 21 per tahun	PPh 21 per bulan
1	K/0	103,200,000	8,600,000	65,417	37,500	8,702,917	435,146	200,000	8,067,771	96,813,250	17,160,000	79,653,250	6,947,988	578,999
2	TK/0	51,600,000	4,300,000	48,917	19,750	4,368,667	218,433	200,000	3,950,233	47,402,800	15,840,000	31,562,800	1,578,140	131,512
3	K/0	93,600,000	7,800,000	80,667	32,417	7,913,083	395,654	200,000	7,317,429	87,809,150	17,160,000	70,649,150	5,597,373	466,448
4	K/2	353,160,000	29,430,000	127,417	70,667	29,628,083	500,000	200,000	28,928,083	347,137,000	19,800,000	327,337,000	46,834,250	3,902,854
5	K/1	108,840,000	9,070,000	69,083	38,583	9,177,667	458,883	200,000	8,518,783	102,225,400	18,480,000	83,745,400	7,561,810	630,151
6	K/0	56,040,000	4,670,000	50,858	24,292	4,745,150	237,258	200,000	4,307,893	51,694,710	17,160,000	34,534,710	1,726,736	143,895
7	K/2	291,000,000	24,250,000	124,333	164,417	24,538,750	500,000	200,000	23,838,750	286,065,000	19,800,000	266,265,000	34,939,750	2,911,646
8	K/2	209,232,000	17,436,000	161,083	145,750	17,742,833	500,000	200,000	17,042,833	204,514,000	19,800,000	184,714,000	22,707,100	1,892,258
9	K/3	560,748,000	46,729,000	181,583	194,083	47,104,667	500,000	200,000	46,404,667	556,856,000	21,120,000	535,736,000	98,934,000	8,244,500
10	TK/0	76,800,000	6,400,000	55,667	27,167	6,482,833	324,142	200,000	5,958,692	71,504,300	15,840,000	55,664,300	3,349,645	279,137
11	TK/0	70,440,000	5,870,000	33,658	21,583	5,925,242	296,262	200,000	5,428,980	65,147,755	15,840,000	49,307,755	2,465,388	205,449
12	K/2	271,200,000	22,600,000	98,750	164,417	22,863,167	500,000	200,000	22,163,167	265,958,000	19,800,000	246,158,000	31,923,700	2,660,308
13	TK/0	51,600,000	4,300,000	65,417	37,500	4,402,917	220,146	200,000	3,982,771	47,793,250	15,840,000	31,953,250	1,597,650	133,138
14	K/0	93,600,000	7,800,000	48,917	19,750	7,868,667	393,433	200,000	7,275,233	87,302,800	17,160,000	70,142,800	5,521,300	460,108
15	K/2	287,160,000	23,930,000	80,667	32,417	24,043,083	500,000	200,000	23,343,083	280,117,000	19,800,000	260,317,000	35,079,250	2,923,271
Jumlah		2,678,220,000	223,185,000	1,292,433	1,030,292	225,507,725	5,979,357	3,000,000	216,528,368	2,598,340,415	270,600,000	2,327,740,415	306,764,078	25,563,673

(Sumber: hasil olahan penulis)

Tabel 4.14. Rincian PPh 21 Karyawan Ditunjang Dengan Metode *Gross Up*

No	Status	Gaji pokok setahun	Gaji pokok per bulan	Tunjangan pajak	Tunjangan lain-lain	Premi asuransi	Penghasilan bruto	Biaya jabatan	Iuran pensiun, THT, JHT	Jumlah penghasilan netto	Jumlah penghasilan netto setahun	PTKP	PKP	PPh 21 per tahun	PPh 21 per bulan
1	K/0	103,200,000	8,600,000	675,217	65,417	37,500	9,378,134	468,907	200,000	8,709,227	104,510,724	17,160,000	87,350,724	8,102,609	675,217
2	TK/0	51,600,000	4,300,000	138,070	48,917	19,750	4,506,737	225,337	200,000	4,081,400	48,976,798	15,840,000	33,136,798	1,656,840	138,070
3	K/0	93,600,000	7,800,000	543,962	80,667	32,417	8,457,045	422,852	200,000	7,834,193	94,010,317	17,160,000	76,850,317	6,527,548	543,962
4	K/2	353,160,000	29,430,000	5,759,354	127,417	70,667	35,387,437	500,000	200,000	34,687,437	416,249,248	19,800,000	396,449,000	69,112,250	5,759,354
5	K/1	108,840,000	9,070,000	734,870	69,083	38,583	9,912,537	495,627	200,000	9,216,910	110,602,918	18,480,000	92,122,918	8,818,438	734,870
6	K/0	56,040,000	4,670,000	151,070	50,858	24,292	4,896,220	244,811	200,000	4,451,409	53,416,908	17,160,000	36,256,908	1,812,845	151,070
7	K/2	291,000,000	24,250,000	4,062,896	124,333	164,417	28,601,646	500,000	200,000	27,901,646	334,819,752	19,800,000	315,019,000	48,754,750	4,062,896
8	K/2	209,232,000	17,436,000	2,226,186	161,083	145,750	19,969,019	500,000	200,000	19,269,019	231,228,232	19,800,000	211,428,232	26,714,235	2,226,186
9	K/3	560,748,000	46,729,000	12,585,792	181,583	194,083	59,690,459	500,000	200,000	58,990,459	707,885,504	21,120,000	686,765,504	151,029,500	12,585,792
10	TK/0	76,800,000	6,400,000	325,524	55,667	27,167	6,808,357	340,418	200,000	6,267,939	75,215,274	15,840,000	59,375,274	3,906,291	325,524
11	TK/0	70,440,000	5,870,000	232,863	33,658	21,583	6,158,105	307,905	200,000	5,650,199	67,802,393	15,840,000	51,962,393	2,794,359	232,863
12	K/2	271,200,000	22,600,000	3,504,375	98,750	164,417	26,367,542	500,000	200,000	25,667,542	308,010,500	19,800,000	288,210,000	42,052,500	3,504,375
13	TK/0	51,600,000	4,300,000	139,778	65,417	37,500	4,542,695	227,135	200,000	4,115,560	49,386,719	15,840,000	33,546,719	1,677,336	139,778
14	K/0	93,600,000	7,800,000	536,571	48,917	19,750	8,405,238	420,262	200,000	7,784,976	93,419,709	17,160,000	76,259,709	6,438,850	536,571
15	K/2	287,160,000	23,930,000	3,897,688	80,667	32,417	27,940,771	500,000	200,000	27,240,771	326,889,256	19,800,000	307,089,256	46,772,250	3,897,688
Jumlah		2,678,220,000	223,185,000	35,514,216	1,292,433	1,030,292	261,021,941	6,153,253	3,000,000	251,868,688	3,022,424,252	270,600,000	2,751,822,752	426,170,600	35,514,217

(Sumber: hasil olahan penulis)

Tabel 4.15. Rincian PPh 21 Karyawan Sebagian Ditunjang dan Sebagian lagi Ditanggung Perusahaan

No	Status	Gaji pokok setahun	Gaji pokok per bulan	Tunjangan pajak	Tunjangan lain-lain	Premi asuransi	Penghasilan bruto	Biaya jabatan	Iuran pensiun, THT, JHT	Jumlah penghasilan netto	Jumlah penghasilan netto setahun	PTKP	PKP	PPh 21 per tahun	PPh 21 per bulan ditanggung
1	K/0	103,200,000	8,600,000	675,217	65,417	37,500	9,378,134	468,907	200,000	8,709,227	104,510,724	17,160,000	87,350,724	8,102,609	
2	TK/0	51,600,000	4,300,000	138,070	48,917	19,750	4,506,737	225,337	200,000	4,081,400	48,976,798	15,840,000	33,136,798	1,656,840	
3	K/0	93,600,000	7,800,000	543,962	80,667	32,417	8,457,045	422,852	200,000	7,834,193	94,010,317	17,160,000	76,850,317	6,527,548	
4	K/2	353,160,000	29,430,000	5,759,354	127,417	70,667	35,387,437	500,000	200,000	34,687,437	416,249,248	19,800,000	396,449,000	69,112,250	
5	K/1	108,840,000	9,070,000	734,870	69,083	38,583	9,912,537	495,627	200,000	9,216,910	110,602,918	18,480,000	92,122,918	8,818,438	
6	K/0	56,040,000	4,670,000	151,070	50,858	24,292	4,896,220	244,811	200,000	4,451,409	53,416,908	17,160,000	36,256,908	1,812,845	
7	K/2	291,000,000	24,250,000	4,062,896	124,333	164,417	28,601,646	500,000	200,000	27,901,646	334,819,752	19,800,000	315,019,000	48,754,750	
8	K/2	209,232,000	17,436,000	2,226,186	161,083	145,750	19,969,019	500,000	200,000	19,269,019	231,228,232	19,800,000	211,428,232	26,714,235	
9	K/3	560,748,000	46,729,000		181,583	194,083	47,104,667	500,000	200,000	46,404,667	556,856,000	21,120,000	535,736,000	98,934,000	8,244,500
10	TK/0	76,800,000	6,400,000	325,524	55,667	27,167	6,808,357	340,418	200,000	6,267,939	75,215,274	15,840,000	59,375,274	3,906,291	
11	TK/0	70,440,000	5,870,000	232,863	33,658	21,583	6,158,105	307,905	200,000	5,650,199	67,802,393	15,840,000	51,962,393	2,794,359	
12	K/2	271,200,000	22,600,000	3,504,375	98,750	164,417	26,367,542	500,000	200,000	25,667,542	308,010,500	19,800,000	288,210,000	42,052,500	
13	TK/0	51,600,000	4,300,000	139,778	65,417	37,500	4,542,695	227,135	200,000	4,115,560	49,386,719	15,840,000	33,546,719	1,677,336	
14	K/0	93,600,000	7,800,000	536,571	48,917	19,750	8,405,238	420,262	200,000	7,784,976	93,419,709	17,160,000	76,259,709	6,438,850	
15	K/2	287,160,000	23,930,000	3,897,688	80,667	32,417	27,940,771	500,000	200,000	27,240,771	326,889,256	19,800,000	307,089,256	46,772,250	
Jumlah		2,678,220,000	223,185,000	22,928,424	1,292,433	1,030,292	248,436,149	6,153,253	3,000,000	239,282,896	2,871,394,748	270,600,000	2,600,793,248	374,075,100	8,244,500

(Sumber: hasil olahan penulis)

Tabel 4.16. Perbandingan Nilai Penghematan dari Alternatif yang ada

Keterangan	PPh 21 Ditanggung		PPh 21 Ditunjang		PPh ditanggung & Ditunjang	
	Komersial	Fiskal	Komersial	Fiskal	Komersial	Fiskal
Penghasilan	6,500,000,000,000	6,500,000,000,000	6,500,000,000,000	6,500,000,000,000	6,500,000,000,000	6,500,000,000,000
Beban operasi :						
Beban gaji	10,401,744,000	10,401,744,000	10,401,744,000	10,401,744,000	10,401,744,000	10,401,744,000
Beban pajak	929,342,178				98,934,000	
Tunjangan pajak (gross up)			1,180,679,467	1,180,679,467	988,307,460	988,307,460
Total beban	11,331,086,178	10,401,744,000	11,582,423,467	11,582,423,467	11,488,985,460	11,390,051,460
Penghasilan netto	6,488,668,913,822	6,489,598,256,000	6,488,417,576,533	6,488,417,576,533	6,488,511,014,540	6,488,609,948,540
PPh yang dibayar						
PPh Badan 25%	1,622,167,228,455	1,622,399,564,000	1,622,104,394,133	1,622,104,394,133	1,622,127,753,635	1,622,152,487,135
PPh Pasal 21		929,342,178		1,180,679,467		1,087,241,460
Total PPh yang dibayar		1,623,328,906,178		1,623,285,073,600		1,623,239,728,595

(Sumber: hasil olahan penulis)

4.5. Beban Tunjangan Makan (*catering*)

Setiap tahun perusahaan setidaknya mengeluarkan beban *catering* untuk karyawan dikantor yang berlokasi di Kalimantan sebesar Rp 3.312.244.464. Sedangkan untuk karyawan yang berlokasi dikantor Jakarta, perusahaan memberikan tunjangan makan berupa uang. Perusahaan memutuskan untuk memberikan tunjangan makan berupa *catering* karena makan dan minum di site lebih susah dibanding di kantor pusat yang berlokasi di Jakarta.

4.5.1. Analisis Perencanaan Pajak pada Beban Tunjangan Makan (*catering*)

Berdasarkan pasal 9 huruf e UU PPh (UU No.36 Tahun 2008) disebutkan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, maka perusahaan tidak dapat membebankan beban tersebut. Berdasarkan UU tersebut, maka perusahaan dapat membebankan beban *catering* yang dikeluarkan karena dikecualikan dalam UU No.36 Tahun 2008. Atas tunjangan uang makan yang diberikan pada karyawan yang berlokasi di Jakarta perusahaan juga dapat membebankan pengeluaran tunjangan uang makan kepada karyawan dalam akuntansi fiskal, karena tunjangan uang makan tersebut melekat pada penghasilan yang diterima karyawan dan merupakan obyek PPh Pasal 21.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

PT RBA belum memiliki pedoman tertulis atas kebijakan kewajiban perpajakan perusahaan. Efisiensi terhadap pajak penghasilan badan yang terutang dapat dilakukan dengan memanfaatkan aspek-aspek perencanaan pajak yang ada dan melakukan perbandingan perhitungan *tax saving* antara alternatif yang ada di setiap aspek perpajakan tersebut. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab IV, maka kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Alternatif yang menghasilkan laba bersih yang maksimal adalah pengadaan aset tetap dengan cara sewa guna usaha dibandingkan dengan kredit investasi dan pembelian secara tunai. Semua beban yang dikeluarkan untuk membayar sewa guna usaha tersebut dapat dibebankan pada tahun yang bersangkutan. Pada saat ini perusahaan menggunakan alternatif sewa guna usaha sebagai pengadaan aset tetap. Oleh karena itu, perusahaan sudah tepat memakai kebijakan dalam pengadaan aset tetap.
2. Alternatif metode penyusutan aset tetap dengan saldo menurun akan menghasilkan *deductible expense* yang lebih besar dibandingkan metode garis lurus baik secara per tahun maupun secara total nilai penyusutan sampai dengan akhir masa depresiasi. Penyusutan yang dicatat oleh PT RBA saat ini dihitung dengan metode garis lurus. Sebaiknya perusahaan menggunakan metode saldo menurun supaya menghasilkan penghematan pajak yang lebih besar.
3. Pemberian tunjangan dalam bentuk penggantian uang pengobatan dan pembayaran premi asuransi untuk asuransi kesehatannya merupakan tindakan yang tepat. Pemberian tunjangan kesehatan merupakan penghasilan bagi karyawan dan merupakan *deductible expense* bagi perusahaan.
4. Apabila sebagian karyawan diberikan tunjangan PPh 21 dan sebagian lagi ditanggung perusahaan, akan memberikan nilai total beban pajak PPh badan dan

PPh pasal 21 karyawan yang paling kecil dibandingkan dengan alternatif lain. Pada saat ini perusahaan menanggung pajak penghasilan atas karyawannya, namun penerapan metode *gross up* atas kewajiban pajak *withholding* lebih menguntungkan bagi PT RBA. Karena beban yang boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan menjadi lebih besar, sehingga menurunkan laba kena pajaknya.

5. Perusahaan dapat membebankan beban *catering* apabila perusahaan memberikan tunjangan makan berupa uang makan yang diberikan kepada karyawan yang berlokasi di Jakarta karena dianggap sebagai penghasilan bagi karyawan dan beban *catering* yang dikeluarkan untuk karyawan yang berlokasi di Kalimantan yang merupakan natura yang dikecualikan dalam UU No. 36 Tahun 2008.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan hendaknya menerapkan metode saldo menurun dalam menghitung beban penyusutan atas aset tetap.
2. Perusahaan hendaknya memberikan tunjangan PPh 21 atas karyawan dengan metode *gross up*.
3. Perusahaan hendaknya memahami dan mengetahui secara mendalam mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memahami ketentuan perpajakan yang berlaku tersebut, baru dapat diketahui aspek-aspek perpajakan yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari pajak tanpa adanya pelanggaran hukum.
4. Memperhitungkan *cost and benefit* dari penerapan perencanaan pajak yang disusun dan ditetapkan sebelumnya.

5. Perusahaan harus lebih jeli dalam membaca keadaan keuangan perusahaan untuk dapat menyusun perencanaan pajak dengan baik, karena dengan perencanaan pajak, perusahaan dapat menghemat pajak terhutang.



DAFTAR REFERENSI

- Faisal, Gatot S.M. (2009). *How to be a Smarter Taxpayer: Six Smart Steps to Deals with Your Tax Affairs*. Jakarta: Grasindo.
- Lumbanturoan, S. (1999). *Akuntansi Pajak Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mangonting, Yenni. (1999). *Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak*. Semarang: Universitas Kristen Petra.
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Mulyono, Teguh Pudjo (1989). *Manajemen Perkreditan*. Yogyakarta: BPFE.
- Nawawi, Hadari. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*, BPFE, Yogyakarta.
- Suandy, Erly. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Muhammad. (2008). *Manajemen Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Lampiran 1. Rincian PPh 21 Karyawan Ditanggung Perusahaan

No	Status	Gaji pokok setahun	Gaji pokok per bulan	Tunjangan lain-lain	Premi asuransi	Penghasilan bruto	Biaya jabatan	Iuran pensiun, THT, JHT	Jumlah penghasilan netto	Jumlah penghasilan netto setahun	PTKP	PKP	PPh 21 per tahun	PPh 21 per bulan
1	K/0	103,200,000	8,600,000	65,417	37,500	8,702,917	435,146	200,000	8,067,771	96,813,250	17,160,000	79,653,250	6,947,988	578,999
2	TK/0	51,600,000	4,300,000	48,917	19,750	4,368,667	218,433	200,000	3,950,233	47,402,800	15,840,000	31,562,800	1,578,140	131,512
3	K/0	93,600,000	7,800,000	80,667	32,417	7,913,083	395,654	200,000	7,317,429	87,809,150	17,160,000	70,649,150	5,597,373	466,448
4	K/2	353,160,000	29,430,000	127,417	70,667	29,628,083	500,000	200,000	28,928,083	347,137,000	19,800,000	327,337,000	46,834,250	3,902,854
5	K/1	108,840,000	9,070,000	69,083	38,583	9,177,667	458,883	200,000	8,518,783	102,225,400	18,480,000	83,745,400	7,561,810	630,151
6	K/0	56,040,000	4,670,000	50,858	24,292	4,745,150	237,258	200,000	4,307,893	51,694,710	17,160,000	34,534,710	1,726,736	143,895
7	K/2	291,000,000	24,250,000	124,333	164,417	24,538,750	500,000	200,000	23,838,750	286,065,000	19,800,000	266,265,000	34,939,750	2,911,646
8	K/2	209,232,000	17,436,000	161,083	145,750	17,742,833	500,000	200,000	17,042,833	204,514,000	19,800,000	184,714,000	22,707,100	1,892,258
9	K/3	560,748,000	46,729,000	181,583	194,083	47,104,667	500,000	200,000	46,404,667	556,856,000	21,120,000	535,736,000	98,934,000	8,244,500
10	TK/0	76,800,000	6,400,000	55,667	27,167	6,482,833	324,142	200,000	5,958,692	71,504,300	15,840,000	55,664,300	3,349,645	279,137
11	TK/0	70,440,000	5,870,000	33,658	21,583	5,925,242	296,262	200,000	5,428,980	65,147,755	15,840,000	49,307,755	2,465,388	205,449
12	K/2	271,200,000	22,600,000	98,750	164,417	22,863,167	500,000	200,000	22,163,167	265,958,000	19,800,000	246,158,000	31,923,700	2,660,308
13	TK/0	51,600,000	4,300,000	65,417	37,500	4,402,917	220,146	200,000	3,982,771	47,793,250	15,840,000	31,953,250	1,597,650	133,138
14	K/0	93,600,000	7,800,000	48,917	19,750	7,868,667	393,433	200,000	7,275,233	87,302,800	17,160,000	70,142,800	5,521,300	460,108
15	K/2	287,160,000	23,930,000	80,667	32,417	24,043,083	500,000	200,000	23,343,083	280,117,000	19,800,000	260,317,000	35,079,250	2,923,271
16	K/1	108,840,000	9,070,000	127,417	70,667	9,268,083	463,404	200,000	8,604,679	103,256,150	18,480,000	84,776,150	7,716,400	643,033
17	K/2	233,760,000	19,480,000	69,083	38,583	19,587,667	500,000	200,000	18,887,667	226,652,000	19,800,000	206,852,000	26,027,800	2,168,983
18	K/3	108,840,000	9,070,000	80,667	32,417	9,183,083	459,154	200,000	8,523,929	102,287,150	21,120,000	81,167,150	7,175,050	597,921
19	TK/0	56,040,000	4,670,000	127,417	70,667	4,868,083	243,404	200,000	4,424,679	53,096,150	15,840,000	37,256,150	1,862,800	155,233
20	TK/0	291,000,000	24,250,000	69,083	38,583	24,357,667	500,000	200,000	23,657,667	283,892,000	15,840,000	268,052,000	37,013,000	3,084,417
21	K/0	209,232,000	17,436,000	50,858	24,292	17,511,150	500,000	200,000	16,811,150	201,733,800	17,160,000	184,573,800	22,685,950	1,890,496
22	TK/0	69,576,000	5,798,000	124,333	164,417	6,086,750	304,338	200,000	5,582,413	66,988,950	15,840,000	51,148,950	2,672,200	222,683
23	K/0	76,800,000	6,400,000	161,083	145,750	6,706,833	335,342	200,000	6,171,492	74,057,900	17,160,000	56,897,900	3,534,550	294,546
24	K/2	70,440,000	5,870,000	181,583	194,083	6,245,667	312,283	200,000	5,733,383	68,800,600	19,800,000	49,000,600	2,450,000	204,167
25	K/1	271,200,000	22,600,000	55,667	27,167	22,682,833	500,000	200,000	21,982,833	263,794,000	18,480,000	245,314,000	31,797,100	2,649,758
26	K/0	51,600,000	4,300,000	161,083	145,750	4,606,833	230,342	200,000	4,176,492	50,117,900	17,160,000	32,957,900	1,647,850	137,321
27	K/2	93,600,000	7,800,000	181,583	194,083	8,175,667	408,783	200,000	7,566,883	90,802,600	19,800,000	71,002,600	5,650,300	470,858
28	K/3	76,800,000	6,400,000	55,667	27,167	6,482,833	324,142	200,000	5,958,692	71,504,300	21,120,000	50,384,300	2,557,600	213,133
29	TK/0	70,440,000	5,870,000	33,658	21,583	5,925,242	296,262	200,000	5,428,980	65,147,755	15,840,000	49,307,755	2,465,350	205,446
30	TK/0	103,200,000	8,600,000	98,750	164,417	8,863,167	443,158	200,000	8,220,008	98,640,100	15,840,000	82,800,100	7,420,000	618,333
31	K/0	51,600,000	4,300,000	65,417	37,500	4,402,917	220,146	200,000	3,982,771	47,793,250	17,160,000	30,633,250	1,531,650	127,638
32	K/2	93,600,000	7,800,000	48,917	19,750	7,868,667	393,433	200,000	7,275,233	87,302,800	19,800,000	67,502,800	5,125,300	427,108
33	K/2	353,160,000	29,430,000	127,417	70,667	29,628,083	500,000	200,000	28,928,083	347,137,000	19,800,000	327,337,000	51,834,250	4,319,521
34	K/3	108,840,000	9,070,000	69,083	38,583	9,177,667	458,883	200,000	8,518,783	102,225,400	21,120,000	81,105,400	7,165,750	597,146
35	TK/0	56,040,000	4,670,000	50,858	24,292	4,745,150	237,258	200,000	4,307,893	51,694,710	15,840,000	35,854,710	1,792,700	149,392
36	TK/0	51,600,000	4,300,000	124,333	164,417	4,588,750	229,438	200,000	4,159,313	49,911,750	15,840,000	34,071,750	1,703,550	141,963
37	K/2	69,600,000	5,800,000	161,083	145,750	6,106,833	305,342	200,000	5,601,492	67,217,900	19,800,000	47,417,900	2,370,850	197,571
38	TK/0	41,160,000	3,430,000	181,583	194,083	3,805,667	190,283	200,000	3,425,100	41,101,200	15,840,000	25,261,200	1,263,050	105,254
39	K/0	108,840,000	9,070,000	55,667	27,167	9,152,833	457,642	200,000	8,495,192	101,942,300	17,160,000	84,782,300	7,717,300	643,108
40	K/2	161,040,000	13,420,000	55,667	27,167	13,502,833	500,000	200,000	12,802,833	153,634,000	19,800,000	133,834,000	15,075,100	1,256,258
41	K/2	108,840,000	9,070,000	33,658	21,583	9,125,242	456,262	200,000	8,468,980	101,627,755	19,800,000	81,827,755	7,274,050	606,171
42	K/3	104,040,000	8,670,000	161,083	145,750	8,976,833	448,842	200,000	8,327,992	99,935,900	21,120,000	78,815,900	6,822,250	568,521
43	TK/0	38,880,000	3,240,000	181,583	194,083	3,615,667	180,783	180,783	3,254,100	39,049,200	15,840,000	23,209,200	1,160,450	96,704
44	TK/0	29,232,000	2,436,000	55,667	27,167	2,518,833	125,942	125,942	2,266,950	27,203,400	15,840,000	11,363,400	568,150	47,346
45	K/0	209,232,000	17,436,000	33,658	21,583	17,491,242	500,000	200,000	16,791,242	201,494,900	17,160,000	184,334,900	22,650,100	1,887,508
46	TK/0	80,748,000	6,729,000	98,750	164,417	6,992,167	349,608	200,000	6,442,558	77,310,700	15,840,000	61,470,700	4,220,500	351,708
47	K/0	76,800,000	6,400,000	65,417	37,500	6,502,917	325,146	200,000	5,977,771	71,733,250	17,160,000	54,573,250	3,185,950	265,496
48	K/2	70,440,000	5,870,000	48,917	19,750	5,938,667	296,933	200,000	5,441,733	65,300,800	19,800,000	45,500,800	2,275,000	189,583

No	Status	Gaji pokok setahun	Gaji pokok per bulan	Tunjangan lain-lain	Premi asuransi	Penghasilan bruto	Biaya jabatan	Iuran pensiun, THT, JHT	Jumlah penghasilan netto	Jumlah penghasilan netto setahun	PTKP	PKP	PPh 21 per tahun	PPh 21 per bulan
49	K/1	151,200,000	12,600,000	127,417	70,667	12,798,083	500,000	200,000	12,098,083	145,177,000	18,480,000	126,697,000	14,004,550	1,167,046
50	K/0	51,600,000	4,300,000	69,083	38,583	4,407,667	220,383	200,000	3,987,283	47,847,400	17,160,000	30,687,400	1,534,350	127,863
51	K/2	93,600,000	7,800,000	50,858	24,292	7,875,150	393,758	200,000	7,281,393	87,376,710	19,800,000	67,576,710	5,136,400	428,033
52	K/3	271,200,000	22,600,000	124,333	164,417	22,888,750	500,000	200,000	22,188,750	266,265,000	21,120,000	245,145,000	31,771,750	2,647,646
53	TK/0	70,440,000	5,870,000	161,083	145,750	6,176,833	308,842	200,000	5,667,992	68,015,900	15,840,000	52,175,900	2,826,250	235,521
54	K/0	103,200,000	8,600,000	181,583	194,083	8,975,667	448,783	200,000	8,326,883	99,922,600	17,160,000	82,762,600	7,414,300	617,858
55	K/2	51,600,000	4,300,000	55,667	27,167	4,382,833	219,142	200,000	3,963,692	47,564,300	19,800,000	27,764,300	1,388,200	115,683
56	K/1	106,800,000	8,900,000	33,658	21,583	8,955,242	447,762	200,000	8,307,480	99,689,755	18,480,000	81,209,755	7,181,350	598,446
57	K/0	52,440,000	4,370,000	98,750	164,417	4,633,167	231,658	200,000	4,201,508	50,418,100	17,160,000	33,258,100	1,662,900	138,575
58	K/2	93,600,000	7,800,000	65,417	37,500	7,902,917	395,146	200,000	7,307,771	87,693,250	19,800,000	67,893,250	5,183,950	431,996
59	K/1	209,160,000	17,430,000	48,917	19,750	17,498,667	500,000	200,000	16,798,667	201,584,000	18,480,000	183,104,000	22,465,600	1,872,133
60	K/0	108,840,000	9,070,000	161,083	145,750	9,376,833	468,842	200,000	8,707,992	104,495,900	17,160,000	87,335,900	8,100,250	675,021
61	K/2	104,040,000	8,670,000	181,583	194,083	9,045,667	452,283	200,000	8,393,383	100,720,600	19,800,000	80,920,600	7,138,000	594,833
62	K/2	171,600,000	14,300,000	55,667	27,167	14,382,833	500,000	200,000	13,682,833	164,194,000	19,800,000	144,394,000	16,659,100	1,388,258
63	K/3	93,600,000	7,800,000	33,658	21,583	7,855,242	392,762	200,000	7,262,480	87,149,755	21,120,000	66,029,755	4,904,350	408,696
64	K/0	113,160,000	9,430,000	98,750	164,417	9,693,167	484,658	200,000	9,008,508	108,102,100	17,160,000	90,942,100	8,641,300	720,108
65	K/2	108,840,000	9,070,000	65,417	37,500	9,172,917	458,646	200,000	8,514,271	102,171,250	19,800,000	82,371,250	7,355,650	612,971
66	K/1	113,160,000	9,430,000	48,917	19,750	9,498,667	474,933	200,000	8,823,733	105,884,800	18,480,000	87,404,800	8,110,600	675,883
67	K/0	70,440,000	5,870,000	80,667	32,417	5,983,083	299,154	200,000	5,483,929	65,807,150	17,160,000	48,647,150	2,432,350	202,696
68	K/2	103,200,000	8,600,000	127,417	70,667	8,798,083	439,904	200,000	8,158,179	97,898,150	19,800,000	78,098,150	6,714,700	559,558
69	K/3	51,600,000	4,300,000	69,083	38,583	4,407,667	220,383	200,000	3,987,283	47,847,400	21,120,000	26,727,400	1,336,350	111,363
70	K/0	93,600,000	7,800,000	50,858	24,292	7,875,150	393,758	200,000	7,281,393	87,376,710	17,160,000	70,216,710	5,532,400	461,033
71	K/2	148,200,000	12,350,000	181,583	194,083	12,725,667	500,000	200,000	12,025,667	144,308,000	19,800,000	124,508,000	13,676,200	1,139,683
72	K/1	108,840,000	9,070,000	55,667	27,167	9,152,833	457,642	200,000	8,495,192	101,942,300	18,480,000	83,462,300	7,519,300	626,608
73	K/0	48,840,000	4,070,000	33,658	21,583	4,125,242	206,262	200,000	3,718,980	44,627,755	17,160,000	27,467,755	1,373,350	114,446
74	K/2	269,280,000	22,440,000	98,750	164,417	22,703,167	500,000	200,000	22,003,167	264,038,000	19,800,000	244,238,000	31,635,700	2,636,308
75	K/3	108,840,000	9,070,000	65,417	37,500	9,172,917	458,646	200,000	8,514,271	102,171,250	21,120,000	81,051,250	7,157,650	596,471
76	TK/0	56,040,000	4,670,000	48,917	19,750	4,738,667	236,933	200,000	4,301,733	51,620,800	15,840,000	35,780,800	1,789,000	149,083
77	K/0	123,000,000	10,250,000	127,417	70,667	10,448,083	500,000	200,000	9,748,083	116,977,000	17,160,000	99,817,000	9,972,550	831,046
78	K/2	209,232,000	17,436,000	69,083	38,583	17,543,667	500,000	200,000	16,843,667	202,124,000	19,800,000	182,324,000	22,348,600	1,862,383
79	K/3	209,232,000	17,436,000	50,858	24,292	17,511,150	500,000	200,000	16,811,150	201,733,800	21,120,000	180,613,800	22,091,950	1,840,996
80	K/0	76,800,000	6,400,000	124,333	164,417	6,688,750	334,438	200,000	6,154,313	73,851,750	17,160,000	56,691,750	3,503,650	291,971
81	K/2	70,440,000	5,870,000	65,417	37,500	5,972,917	298,646	200,000	5,474,271	65,691,250	19,800,000	45,891,250	2,294,550	191,213
82	K/1	151,200,000	12,600,000	48,917	19,750	12,668,667	500,000	200,000	11,968,667	143,624,000	18,480,000	125,144,000	13,771,600	1,147,633
83	K/0	51,600,000	4,300,000	80,667	32,417	4,413,083	220,654	200,000	3,992,429	47,909,150	17,160,000	30,749,150	1,537,450	128,121
Total		10,401,744,000	866,812,000	7,529,675	6,307,667	880,649,342	31,939,928	16,497,008	832,212,406	9,986,548,870	1,519,320,000	8,467,228,870	929,342,178	77,445,182

Lampiran 2. Rincian PPh 21 Karyawan Ditunjang Dengan Metode Gross Up

No	Status	Gaji pokok setahun	Gaji pokok per bulan	Tunjangan pajak	Tunjangan lain-lain	Premi asuransi	Penghasilan bruto	Biaya jabatan	Luran pensiun, THT, JHT	Jumlah penghasilan netto	Jumlah penghasilan netto setahun	PTKP	PKP	PPh 21 per tahun	PPh 21 per bulan
1	K/0	103,200,000	8,600,000	675,217	65,417	37,500	9,378,134	468,907	200,000	8,709,227	104,510,724	17,160,000	87,350,724	8,102,609	675,217
2	TK/0	51,600,000	4,300,000	138,070	48,917	19,750	4,506,737	225,337	200,000	4,081,400	48,976,798	15,840,000	33,136,798	1,656,840	138,070
3	K/0	93,600,000	7,800,000	543,962	80,667	32,417	8,457,045	422,852	200,000	7,834,193	94,010,317	17,160,000	76,850,317	6,527,548	543,962
4	K/2	353,160,000	29,430,000	5,759,354	127,417	70,667	35,387,437	500,000	200,000	34,687,437	416,249,248	19,800,000	396,449,000	69,112,250	5,759,354
5	K/1	108,840,000	9,070,000	734,870	69,083	38,583	9,912,537	495,627	200,000	9,216,910	110,602,918	18,480,000	92,122,918	8,818,438	734,870
6	K/0	56,040,000	4,670,000	151,070	50,858	24,292	4,896,220	244,811	200,000	4,451,409	53,416,908	17,160,000	36,256,908	1,812,845	151,070
7	K/2	291,000,000	24,250,000	4,062,896	124,333	164,417	28,601,646	500,000	200,000	27,901,646	334,819,752	19,800,000	315,019,000	48,754,750	4,062,896
8	K/2	209,232,000	17,436,000	2,226,186	161,083	145,750	19,969,019	500,000	200,000	19,269,019	231,228,232	19,800,000	211,428,232	26,714,235	2,226,186
9	K/3	560,748,000	46,729,000	12,585,792	181,583	194,083	59,690,459	500,000	200,000	58,990,459	707,885,504	21,120,000	686,765,504	151,029,500	12,585,792
10	TK/0	76,800,000	6,400,000	325,524	55,667	27,167	6,808,357	340,418	200,000	6,267,939	75,215,274	15,840,000	59,375,274	3,906,291	325,524
11	TK/0	70,440,000	5,870,000	232,863	33,658	21,583	6,158,105	307,905	200,000	5,650,199	67,802,393	15,840,000	51,962,393	2,794,359	232,863
12	K/2	271,200,000	22,600,000	3,504,375	98,750	164,417	26,367,542	500,000	200,000	25,667,542	308,010,500	19,800,000	288,210,000	42,052,500	3,504,375
13	TK/0	51,600,000	4,300,000	139,778	65,417	37,500	4,542,695	227,135	200,000	4,115,560	49,386,719	15,840,000	33,546,719	1,677,336	139,778
14	K/0	93,600,000	7,800,000	536,571	48,917	19,750	8,405,238	420,262	200,000	7,784,976	93,419,709	17,160,000	76,259,709	6,438,850	536,571
15	K/2	287,160,000	23,930,000	3,897,688	80,667	32,417	27,940,771	500,000	200,000	27,240,771	326,889,256	19,800,000	307,089,256	46,772,250	3,897,688
16	K/1	108,840,000	9,070,000	730,733	127,417	70,667	9,998,816	499,941	200,000	9,298,876	111,586,506	18,480,000	93,106,506	8,768,800	730,733
17	K/2	233,760,000	19,480,000	2,551,733	69,083	38,583	22,139,400	500,000	200,000	21,439,400	257,272,796	19,800,000	237,472,796	30,620,800	2,551,733
18	K/3	108,840,000	9,070,000	697,283	80,667	32,417	9,880,366	494,018	200,000	9,186,348	110,236,176	21,120,000	89,116,176	8,367,400	697,283
19	TK/0	56,040,000	4,670,000	162,975	127,417	70,667	5,031,058	251,553	200,000	4,579,505	54,954,065	15,840,000	39,114,065	1,955,703	162,975
20	TK/0	291,000,000	24,250,000	4,112,542	69,083	38,583	28,470,209	500,000	200,000	27,770,209	333,242,504	15,840,000	317,402,504	49,350,500	4,112,542
21	K/0	209,232,000	17,436,000	2,224,121	50,858	24,292	19,735,271	500,000	200,000	19,035,271	228,423,252	17,160,000	211,263,252	26,689,450	2,224,121
22	TK/0	69,576,000	5,798,000	259,702	124,333	164,417	6,346,452	317,323	200,000	5,829,129	69,949,553	15,840,000	54,109,553	3,116,433	259,702
23	K/0	76,800,000	6,400,000	343,496	161,083	145,750	7,050,329	352,516	200,000	6,497,813	77,973,754	17,160,000	60,813,754	4,121,950	343,496
24	K/2	70,440,000	5,870,000	228,383	181,583	194,083	6,474,050	323,702	200,000	5,950,347	71,404,166	19,800,000	51,604,166	2,740,600	228,383
25	K/1	271,200,000	22,600,000	3,480,938	55,667	27,167	26,163,771	500,000	200,000	25,463,771	305,565,256	18,480,000	287,085,256	41,771,250	3,480,938
26	K/0	51,600,000	4,300,000	144,171	161,083	145,750	4,751,004	237,550	200,000	4,313,454	51,761,449	17,160,000	34,601,449	1,730,050	144,171
27	K/2	93,600,000	7,800,000	549,108	181,583	194,083	8,724,775	436,239	200,000	8,088,536	97,062,431	19,800,000	77,262,431	6,589,300	549,108
28	K/3	76,800,000	6,400,000	248,546	55,667	27,167	6,731,379	336,569	200,000	6,194,810	74,337,724	21,120,000	53,217,724	2,982,550	248,546
29	TK/0	70,440,000	5,870,000	232,858	33,658	21,583	6,158,100	307,905	200,000	5,650,195	67,802,336	15,840,000	51,962,336	2,794,300	232,858
30	TK/0	103,200,000	8,600,000	721,083	98,750	164,417	9,584,250	479,212	200,000	8,905,037	106,860,446	15,840,000	91,020,446	8,653,000	721,083
31	K/0	51,600,000	4,300,000	144,171	65,417	37,500	4,547,088	227,354	200,000	4,119,733	49,436,799	17,160,000	32,276,799	1,730,050	144,171
32	K/2	93,600,000	7,800,000	549,108	48,917	19,750	8,417,775	420,889	200,000	7,796,886	93,562,631	19,800,000	73,762,631	6,589,300	549,108
33	K/2	353,160,000	29,430,000	5,759,354	127,417	70,667	35,387,437	500,000	200,000	34,687,437	416,249,248	19,800,000	396,449,248	69,112,250	5,759,354
34	K/3	108,840,000	9,070,000	697,283	69,083	38,583	9,874,950	493,747	200,000	9,181,202	110,174,426	21,120,000	89,054,426	8,367,400	697,283
35	TK/0	56,040,000	4,670,000	162,975	50,858	24,292	4,908,125	245,406	200,000	4,462,719	53,552,625	15,840,000	37,712,625	1,885,631	162,975
36	TK/0	51,600,000	4,300,000	149,042	124,333	164,417	4,737,792	236,890	200,000	4,300,902	51,610,829	15,840,000	35,770,829	1,788,500	149,042
37	K/2	69,600,000	5,800,000	207,425	161,083	145,750	6,314,258	315,713	200,000	5,798,545	69,582,545	19,800,000	49,782,545	2,489,100	207,425
38	TK/0	41,160,000	3,430,000	110,500	181,583	194,083	3,916,167	195,808	195,808	3,524,550	42,294,600	15,840,000	26,454,600	1,326,000	110,500
39	K/0	108,840,000	9,070,000	749,971	55,667	27,167	9,902,804	495,140	200,000	9,207,664	110,491,969	17,160,000	93,331,969	8,999,650	749,971
40	K/2	161,040,000	13,420,000	1,477,946	55,667	27,167	14,980,779	500,000	200,000	14,280,779	171,369,352	19,800,000	151,569,352	17,735,350	1,477,946
41	K/2	108,840,000	9,070,000	706,908	33,658	21,583	9,832,150	491,607	200,000	9,140,542	109,686,506	19,800,000	89,886,506	8,482,900	706,908
42	K/3	104,040,000	8,670,000	663,008	161,083	145,750	9,639,841	481,992	200,000	8,957,849	107,494,191	21,120,000	86,374,191	7,956,100	663,008
43	TK/0	38,880,000	3,240,000	101,525	181,583	194,083	3,717,192	185,860	185,860	3,345,473	40,145,670	15,840,000	24,305,670	1,218,300	101,525
44	TK/0	29,232,000	2,436,000	49,708	55,667	27,167	2,568,541	128,427	128,427	2,311,687	27,740,246	15,840,000	11,900,246	596,500	49,708
45	K/0	209,232,000	17,436,000	2,220,608	33,658	21,583	19,711,850	500,000	200,000	19,011,850	228,142,196	17,160,000	210,982,196	26,647,300	2,220,608
46	TK/0	80,748,000	6,729,000	410,158	98,750	164,417	7,402,325	370,116	200,000	6,832,208	81,986,501	15,840,000	66,146,501	4,921,900	410,158
47	K/0	76,800,000	6,400,000	343,496	65,417	37,500	6,846,413	342,321	200,000	6,304,092	75,649,104	17,160,000	58,489,104	4,121,950	343,496
48	K/2	70,440,000	5,870,000	199,038	48,917	19,750	6,137,705	306,885	200,000	5,630,819	67,569,833	19,800,000	47,769,833	2,388,450	199,038
49	K/1	151,200,000	12,600,000	1,372,983	127,417	70,667	14,171,066	500,000	200,000	13,471,066	161,652,796	18,480,000	143,172,796	16,475,800	1,372,983
50	K/0	51,600,000	4,300,000	144,171	69,083	38,583	4,551,838	227,592	200,000	4,124,246	49,490,949	17,160,000	32,330,949	1,730,050	144,171
51	K/2	93,600,000	7,800,000	503,783	50,858	24,292	8,378,933	418,947	200,000	7,759,986	93,119,836	19,800,000	73,319,836	6,045,400	503,783
52	K/3	271,200,000	22,600,000	3,476,229	124,333	164,417	26,364,979	500,000	200,000	25,664,979	307,979,748	21,120,000	286,859,748	41,714,750	3,476,229
53	TK/0	70,440,000	5,870,000	274,658	161,083	145,750	6,451,491	322,575	200,000	5,928,917	71,147,001	15,840,000	55,307,001	3,295,900	274,658
54	K/0	103,200,000	8,600,000	720,533	181,583	194,083	9,696,200	484,810	200,000	9,011,390	108,136,676	17,160,000	90,976,676	8,646,400	720,533

No	Status	Gaji pokok setahun	Gaji pokok per bulan	Tunjangan pajak	Tunjangan lain-lain	Premi asuransi	Penghasilan bruto	Biaya jabatan	Iuran pensiun, THT, JHT	Jumlah penghasilan netto	Jumlah penghasilan netto setahun	PTKP	PKP	PPh 21 per tahun	PPh 21 per bulan
55	K/2	51,600,000	4,300,000	121,450	55,667	27,167	4,504,283	225,214	200,000	4,079,069	48,948,830	19,800,000	29,148,830	1,457,400	121,450
56	K/1	106,800,000	8,900,000	697,896	33,658	21,583	9,653,138	482,657	200,000	8,970,481	107,645,769	18,480,000	89,165,769	8,374,750	697,896
57	K/0	52,440,000	4,370,000	145,483	98,750	164,417	4,778,650	238,932	200,000	4,339,717	52,076,606	17,160,000	34,916,606	1,745,800	145,483
58	K/2	93,600,000	7,800,000	503,783	65,417	37,500	8,406,700	420,335	200,000	7,786,365	93,436,376	19,800,000	73,636,376	6,045,400	503,783
59	K/1	209,160,000	17,430,000	2,202,496	48,917	19,750	19,701,163	500,000	200,000	19,001,163	228,013,952	18,480,000	209,533,952	26,429,950	2,202,496
60	K/0	108,840,000	9,070,000	749,971	161,083	145,750	10,126,804	500,000	200,000	9,426,804	113,121,652	17,160,000	95,961,652	8,999,650	749,971
61	K/2	104,040,000	8,670,000	693,683	181,583	194,083	9,739,350	486,967	200,000	9,052,382	108,628,586	19,800,000	88,828,586	8,324,200	693,683
62	K/2	171,600,000	14,300,000	1,633,233	55,667	27,167	16,016,066	500,000	200,000	15,316,066	183,792,796	19,800,000	163,992,796	19,598,800	1,633,233
63	K/3	93,600,000	7,800,000	476,621	33,658	21,583	8,331,863	416,593	200,000	7,715,270	92,583,234	21,120,000	71,463,234	5,719,450	476,621
64	K/0	113,160,000	9,430,000	844,471	98,750	164,417	10,537,638	500,000	200,000	9,837,638	118,051,652	17,160,000	100,891,652	10,133,650	844,471
65	K/2	108,840,000	9,070,000	714,833	65,417	37,500	9,887,750	494,387	200,000	9,193,362	110,320,346	19,800,000	90,520,346	8,578,000	714,833
66	K/1	113,160,000	9,430,000	790,733	48,917	19,750	10,289,400	500,000	200,000	9,589,400	115,072,796	18,480,000	96,592,796	9,488,800	790,733
67	K/0	70,440,000	5,870,000	223,221	80,667	32,417	6,206,304	310,315	200,000	5,695,989	68,351,869	17,160,000	51,191,869	2,678,650	223,221
68	K/2	103,200,000	8,600,000	652,546	127,417	70,667	9,450,629	472,531	200,000	8,778,098	105,337,174	19,800,000	85,537,174	7,830,550	652,546
69	K/3	51,600,000	4,300,000	116,917	69,083	38,583	4,524,584	226,229	200,000	4,098,354	49,180,254	21,120,000	28,060,254	1,403,000	116,917
70	K/0	93,600,000	7,800,000	537,646	50,858	24,292	8,412,796	420,640	200,000	7,792,156	93,505,874	17,160,000	76,345,874	6,451,750	537,646
71	K/2	148,200,000	12,350,000	1,340,796	181,583	194,083	14,066,463	500,000	200,000	13,366,463	160,397,552	19,800,000	140,597,552	16,089,550	1,340,796
72	K/1	108,840,000	9,070,000	730,733	55,667	27,167	9,883,566	494,178	200,000	9,189,388	110,272,656	18,480,000	91,792,656	8,768,800	730,733
73	K/0	48,840,000	4,070,000	120,154	33,658	21,583	4,245,396	212,270	200,000	3,833,126	45,997,511	17,160,000	28,837,511	1,441,850	120,154
74	K/2	269,280,000	22,440,000	3,451,042	98,750	164,417	26,154,209	500,000	200,000	25,454,209	305,450,504	19,800,000	285,650,504	41,412,500	3,451,042
75	K/3	108,840,000	9,070,000	697,283	65,417	37,500	9,870,200	493,510	200,000	9,176,690	110,120,276	21,120,000	89,000,276	8,367,400	697,283
76	TK/0	56,040,000	4,670,000	156,521	48,917	19,750	4,895,188	244,759	200,000	4,450,428	53,405,139	15,840,000	37,565,139	1,878,250	156,521
77	K/0	123,000,000	10,250,000	977,696	127,417	70,667	11,425,779	500,000	200,000	10,725,779	128,709,352	17,160,000	111,549,352	11,732,350	977,696
78	K/2	209,232,000	17,436,000	2,191,033	69,083	38,583	19,734,700	500,000	200,000	19,034,700	228,416,396	19,800,000	208,616,396	26,292,400	2,191,033
79	K/3	209,232,000	17,436,000	2,165,883	50,858	24,292	19,677,033	500,000	200,000	18,977,033	227,724,396	21,120,000	206,604,396	25,990,600	2,165,883
80	K/0	76,800,000	6,400,000	340,496	124,333	164,417	7,029,246	351,462	200,000	6,477,784	77,733,404	17,160,000	60,573,404	4,085,950	340,496
81	K/2	70,440,000	5,870,000	228,383	65,417	37,500	6,201,300	310,065	200,000	5,691,235	68,294,816	19,800,000	48,494,816	2,740,600	228,383
82	K/1	151,200,000	12,600,000	1,350,146	48,917	19,750	14,018,813	500,000	200,000	13,318,813	159,825,752	18,480,000	141,345,752	16,201,750	1,350,146
83	K/0	51,600,000	4,300,000	144,171	80,667	32,417	4,557,254	227,863	200,000	4,129,392	49,552,699	17,160,000	32,392,699	1,730,050	144,171
Total		10,401,744,000	866,812,000	98,395,789	7,529,675	6,307,667	979,045,131	33,110,771	16,510,095	929,424,264	11,153,091,172	1,519,320,000	9,633,769,672	1,180,679,467	98,389,956



Lampiran 3. Rincian PPh 21 Karyawan Sebagian Ditunjang dan Sebagian lagi Ditanggung Perusahaan

No	Status	Gaji pokok setahun	Gaji pokok per bulan	Tunjangan pajak	Tunjangan lain-lain	Premi asuransi	Penghasilan bruto	Biaya jabatan	Luran pensiun, THT, JHT	Jumlah penghasilan netto	Jumlah penghasilan netto setahun	PTKP	PKP	PPh 21 per tahun	PPh 21 per bulan ditanggung
1	K/0	103,200,000	8,600,000	675,217	65,417	37,500	9,378,134	468,907	200,000	8,709,227	104,510,724	17,160,000	87,350,724	8,102,609	
2	TK/0	51,600,000	4,300,000	138,070	48,917	19,750	4,506,737	225,337	200,000	4,081,400	48,976,798	15,840,000	33,136,798	1,656,840	
3	K/0	93,600,000	7,800,000	543,962	80,667	32,417	8,457,045	422,852	200,000	7,834,193	94,010,317	17,160,000	76,850,317	6,527,548	
4	K/2	353,160,000	29,430,000	5,759,354	127,417	70,667	35,387,437	500,000	200,000	34,687,437	416,249,248	19,800,000	396,449,000	69,112,250	
5	K/1	108,840,000	9,070,000	734,870	69,083	38,583	9,912,537	495,627	200,000	9,216,910	110,602,918	18,480,000	92,122,918	8,818,438	
6	K/0	56,040,000	4,670,000	151,070	50,858	24,292	4,896,220	244,811	200,000	4,451,409	53,416,908	17,160,000	36,256,908	1,812,845	
7	K/2	291,000,000	24,250,000	4,062,896	124,333	164,417	28,601,646	500,000	200,000	27,901,646	334,819,752	19,800,000	315,019,000	48,754,750	
8	K/2	209,232,000	17,436,000	2,226,186	161,083	145,750	19,969,019	500,000	200,000	19,269,019	231,228,232	19,800,000	211,428,232	26,714,235	
9	K/3	560,748,000	46,729,000		181,583	194,083	47,104,667	500,000	200,000	46,404,667	556,856,000	21,120,000	535,736,000	98,934,000	8,244,500
10	TK/0	76,800,000	6,400,000	325,524	55,667	27,167	6,808,357	340,418	200,000	6,267,939	75,215,274	15,840,000	59,375,274	3,906,291	
11	TK/0	70,440,000	5,870,000	232,863	33,658	21,583	6,158,105	307,905	200,000	5,650,199	67,802,393	15,840,000	51,962,393	2,794,359	
12	K/2	271,200,000	22,600,000	3,504,375	98,750	164,417	26,367,542	500,000	200,000	25,667,542	308,010,500	19,800,000	288,210,000	42,052,500	
13	TK/0	51,600,000	4,300,000	139,778	65,417	37,500	4,542,695	227,135	200,000	4,115,560	49,386,719	15,840,000	33,546,719	1,677,336	
14	K/0	93,600,000	7,800,000	536,571	48,917	19,750	8,405,238	420,262	200,000	7,784,976	93,419,709	17,160,000	76,259,709	6,438,850	
15	K/2	287,160,000	23,930,000	3,897,688	80,667	32,417	27,940,771	500,000	200,000	27,240,771	326,889,256	19,800,000	307,089,256	46,772,250	
16	K/1	108,840,000	9,070,000	730,733	127,417	70,667	9,998,816	499,941	200,000	9,298,876	111,586,506	18,480,000	93,106,506	8,768,800	
17	K/2	233,760,000	19,480,000	2,551,733	69,083	38,583	22,139,400	500,000	200,000	21,439,400	257,272,796	19,800,000	237,472,796	30,620,800	
18	K/3	108,840,000	9,070,000	697,283	80,667	32,417	9,880,366	494,018	200,000	9,186,348	110,236,176	21,120,000	89,116,176	8,367,400	
19	TK/0	56,040,000	4,670,000	162,975	127,417	70,667	5,031,058	251,553	200,000	4,579,505	54,954,065	15,840,000	39,114,065	1,955,703	
20	TK/0	291,000,000	24,250,000	4,112,542	69,083	38,583	28,470,209	500,000	200,000	27,770,209	333,242,504	15,840,000	317,402,504	49,350,500	
21	K/0	209,232,000	17,436,000	2,224,121	50,858	24,292	19,735,271	500,000	200,000	19,035,271	228,423,252	17,160,000	211,263,252	26,689,450	
22	TK/0	69,576,000	5,798,000	259,702	124,333	164,417	6,346,452	317,323	200,000	5,829,129	69,949,553	15,840,000	54,109,553	3,116,433	
23	K/0	76,800,000	6,400,000	343,496	161,083	145,750	7,050,329	352,516	200,000	6,497,813	77,973,754	17,160,000	60,813,754	4,121,950	
24	K/2	70,440,000	5,870,000	228,383	181,583	194,083	6,474,050	323,702	200,000	5,950,347	71,404,166	19,800,000	51,604,166	2,740,600	
25	K/1	271,200,000	22,600,000	3,480,938	55,667	27,167	26,163,771	500,000	200,000	25,463,771	305,565,256	18,480,000	287,085,256	41,771,250	
26	K/0	51,600,000	4,300,000	144,171	161,083	145,750	4,751,004	237,550	200,000	4,313,454	51,761,449	17,160,000	34,601,449	1,730,050	
27	K/2	93,600,000	7,800,000	549,108	181,583	194,083	8,724,775	436,239	200,000	8,088,536	97,062,431	19,800,000	77,262,431	6,589,300	
28	K/3	76,800,000	6,400,000	248,546	55,667	27,167	6,731,379	336,569	200,000	6,194,810	74,337,724	21,120,000	53,217,724	2,982,550	
29	TK/0	70,440,000	5,870,000	232,858	33,658	21,583	6,158,100	307,905	200,000	5,650,195	67,802,336	15,840,000	51,962,336	2,794,300	
30	TK/0	103,200,000	8,600,000	721,083	98,750	164,417	9,584,250	479,212	200,000	8,905,037	106,860,446	15,840,000	91,020,446	8,653,000	
31	K/0	51,600,000	4,300,000	144,171	65,417	37,500	4,547,088	227,354	200,000	4,119,733	49,436,799	17,160,000	32,276,799	1,730,050	
32	K/2	93,600,000	7,800,000	549,108	48,917	19,750	8,417,775	420,889	200,000	7,796,886	93,562,631	19,800,000	73,762,631	6,589,300	
33	K/2	353,160,000	29,430,000	5,759,354	127,417	70,667	35,387,437	500,000	200,000	34,687,437	416,249,248	19,800,000	396,449,248	69,112,250	
34	K/3	108,840,000	9,070,000	697,283	69,083	38,583	9,874,950	493,747	200,000	9,181,202	110,174,426	21,120,000	89,054,426	8,367,400	
35	TK/0	56,040,000	4,670,000	162,975	50,858	24,292	4,908,125	245,406	200,000	4,462,719	53,552,625	15,840,000	37,712,625	1,885,631	
36	TK/0	51,600,000	4,300,000	149,042	124,333	164,417	4,737,792	236,890	200,000	4,300,902	51,610,829	15,840,000	35,770,829	1,788,500	
37	K/2	69,600,000	5,800,000	207,425	161,083	145,750	6,314,258	315,713	200,000	5,798,545	69,582,545	19,800,000	49,782,545	2,489,100	
38	TK/0	41,160,000	3,430,000	110,500	181,583	194,083	3,916,167	195,808	195,808	3,524,550	42,294,600	15,840,000	26,454,600	1,326,000	
39	K/0	108,840,000	9,070,000	749,971	55,667	27,167	9,902,804	495,140	200,000	9,207,664	110,491,969	17,160,000	93,331,969	8,999,650	
40	K/2	161,040,000	13,420,000	1,477,946	55,667	27,167	14,980,779	500,000	200,000	14,280,779	171,369,352	19,800,000	151,569,352	17,735,350	
41	K/2	108,840,000	9,070,000	706,908	33,658	21,583	9,832,150	491,607	200,000	9,140,542	109,686,506	19,800,000	89,886,506	8,482,900	
42	K/3	104,040,000	8,670,000	663,008	161,083	145,750	9,639,841	481,992	200,000	8,957,849	107,494,191	21,120,000	86,374,191	7,956,100	
43	TK/0	38,880,000	3,240,000	101,525	181,583	194,083	3,717,192	185,860	185,860	3,345,473	40,145,670	15,840,000	24,305,670	1,218,300	
44	TK/0	29,232,000	2,436,000	49,708	55,667	27,167	2,568,541	128,427	128,427	2,311,687	27,740,246	15,840,000	11,900,246	596,500	
45	K/0	209,232,000	17,436,000	2,220,608	33,658	21,583	19,711,850	500,000	200,000	19,011,850	228,142,196	17,160,000	210,982,196	26,647,300	
46	TK/0	80,748,000	6,729,000	410,158	98,750	164,417	7,402,325	370,116	200,000	6,832,208	81,986,501	15,840,000	66,146,501	4,921,900	
47	K/0	76,800,000	6,400,000	343,496	65,417	37,500	6,846,413	342,321	200,000	6,304,092	75,649,104	17,160,000	58,489,104	4,121,950	
48	K/2	70,440,000	5,870,000	199,038	48,917	19,750	6,137,705	306,885	200,000	5,630,819	67,569,833	19,800,000	47,769,833	2,388,450	
49	K/1	151,200,000	12,600,000	1,372,983	127,417	70,667	14,171,066	500,000	200,000	13,471,066	161,652,796	18,480,000	143,172,796	16,475,800	
50	K/0	51,600,000	4,300,000	144,171	69,083	38,583	4,551,838	227,592	200,000	4,124,246	49,490,949	17,160,000	32,330,949	1,730,050	
51	K/2	93,600,000	7,800,000	503,783	50,858	24,292	8,378,933	418,947	200,000	7,759,986	93,119,836	19,800,000	73,319,836	6,045,400	
52	K/3	271,200,000	22,600,000	3,476,229	124,333	164,417	26,364,979	500,000	200,000	25,664,979	307,979,748	21,120,000	286,859,748	41,714,750	

No	Status	Gaji pokok setahun	Gaji pokok per bulan	Tunjangan pajak	Tunjangan lain-lain	Premi asuransi	Penghasilan bruto	Biaya jabatan	Iuran pensiun, THT, JHT	Jumlah penghasilan netto	Jumlah penghasilan netto setahun	PTKP	PKP	PPh 21 per tahun	PPh 21 per bulan ditanggung
53	TK/0	70,440,000	5,870,000	274,658	161,083	145,750	6,451,491	322,575	200,000	5,928,917	71,147,001	15,840,000	55,307,001	3,295,900	
54	K/0	103,200,000	8,600,000	720,533	181,583	194,083	9,696,200	484,810	200,000	9,011,390	108,136,676	17,160,000	90,976,676	8,646,400	
55	K/2	51,600,000	4,300,000	121,450	55,667	27,167	4,504,283	225,214	200,000	4,079,069	48,948,830	19,800,000	29,148,830	1,457,400	
56	K/1	106,800,000	8,900,000	697,896	33,658	21,583	9,653,138	482,657	200,000	8,970,481	107,645,769	18,480,000	89,165,769	8,374,750	
57	K/0	52,440,000	4,370,000	145,483	98,750	164,417	4,778,650	238,932	200,000	4,339,717	52,076,606	17,160,000	34,916,606	1,745,800	
58	K/2	93,600,000	7,800,000	503,783	65,417	37,500	8,406,700	420,335	200,000	7,786,365	93,436,376	19,800,000	73,636,376	6,045,400	
59	K/1	209,160,000	17,430,000	2,202,496	48,917	19,750	19,701,163	500,000	200,000	19,001,163	228,013,952	18,480,000	209,533,952	26,429,950	
60	K/0	108,840,000	9,070,000	749,971	161,083	145,750	10,126,804	500,000	200,000	9,426,804	113,121,652	17,160,000	95,961,652	8,999,650	
61	K/2	104,040,000	8,670,000	693,683	181,583	194,083	9,739,350	486,967	200,000	9,052,382	108,628,586	19,800,000	88,828,586	8,324,200	
62	K/2	171,600,000	14,300,000	1,633,233	55,667	27,167	16,016,066	500,000	200,000	15,316,066	183,792,796	19,800,000	163,992,796	19,598,800	
63	K/3	93,600,000	7,800,000	476,621	33,658	21,583	8,331,863	416,593	200,000	7,715,270	92,583,234	21,120,000	71,463,234	5,719,450	
64	K/0	113,160,000	9,430,000	844,471	98,750	164,417	10,537,638	500,000	200,000	9,837,638	118,051,652	17,160,000	100,891,652	10,133,650	
65	K/2	108,840,000	9,070,000	714,833	65,417	37,500	9,887,750	494,387	200,000	9,193,362	110,320,346	19,800,000	90,520,346	8,578,000	
66	K/1	113,160,000	9,430,000	790,733	48,917	19,750	10,289,400	500,000	200,000	9,589,400	115,072,796	18,480,000	96,592,796	9,488,800	
67	K/0	70,440,000	5,870,000	223,221	80,667	32,417	6,206,304	310,315	200,000	5,695,989	68,351,869	17,160,000	51,191,869	2,678,650	
68	K/2	103,200,000	8,600,000	652,546	127,417	70,667	9,450,629	472,531	200,000	8,778,098	105,337,174	19,800,000	85,537,174	7,830,550	
69	K/3	51,600,000	4,300,000	116,917	69,083	38,583	4,524,584	226,229	200,000	4,098,354	49,180,254	21,120,000	28,060,254	1,403,000	
70	K/0	93,600,000	7,800,000	537,646	50,858	24,292	8,412,796	420,640	200,000	7,792,156	93,505,874	17,160,000	76,345,874	6,451,750	
71	K/2	148,200,000	12,350,000	1,340,796	181,583	194,083	14,066,463	500,000	200,000	13,366,463	160,397,552	19,800,000	140,597,552	16,089,550	
72	K/1	108,840,000	9,070,000	730,733	55,667	27,167	9,883,566	494,178	200,000	9,189,388	110,272,656	18,480,000	91,792,656	8,768,800	
73	K/0	48,840,000	4,070,000	120,154	33,658	21,583	4,245,396	212,270	200,000	3,833,126	45,997,511	17,160,000	28,837,511	1,441,850	
74	K/2	269,280,000	22,440,000		98,750	164,417	22,703,167	500,000	200,000	22,003,167	264,038,000	19,800,000	244,238,000	31,635,700	
75	K/3	108,840,000	9,070,000	697,283	65,417	37,500	9,870,200	493,510	200,000	9,176,690	110,120,276	21,120,000	89,000,276	8,367,400	
76	TK/0	56,040,000	4,670,000	156,521	48,917	19,750	4,895,188	244,759	200,000	4,450,428	53,405,139	15,840,000	37,565,139	1,878,250	
77	K/0	123,000,000	10,250,000	977,696	127,417	70,667	11,425,779	500,000	200,000	10,725,779	128,709,352	17,160,000	111,549,352	11,732,350	
78	K/2	209,232,000	17,436,000	2,191,033	69,083	38,583	19,734,700	500,000	200,000	19,034,700	228,416,396	19,800,000	208,616,396	26,292,400	
79	K/3	209,232,000	17,436,000	2,165,883	50,858	24,292	19,677,033	500,000	200,000	18,977,033	227,724,396	21,120,000	206,604,396	25,990,600	
80	K/0	76,800,000	6,400,000	340,496	124,333	164,417	7,029,246	351,462	200,000	6,477,784	77,733,404	17,160,000	60,573,404	4,085,950	
81	K/2	70,440,000	5,870,000	228,383	65,417	37,500	6,201,300	310,065	200,000	5,691,235	68,294,816	19,800,000	48,494,816	2,740,600	
82	K/1	151,200,000	12,600,000	1,350,146	48,917	19,750	14,018,813	500,000	200,000	13,318,813	159,825,752	18,480,000	141,345,752	16,201,750	
83	K/0	51,600,000	4,300,000	144,171	80,667	32,417	4,557,254	227,863	200,000	4,129,392	49,552,699	17,160,000	32,392,699	1,730,050	
Total		10,401,744,000	866,812,000	82,358,955	7,529,675	6,307,667	963,008,297	33,110,771	16,510,095	913,387,430	10,960,649,164	1,519,320,000	9,441,327,664	1,118,807,167	8,244,500